



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B
JALAN DERMOJOYO NO. 20 NGANJUK 64418-JAWA TIMUR
TELP. (0358) 321752-321666, FAX. (0358) 321752
www.pn-nganjuk.go.id
pn.nganjuk@gmail.com



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami *Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB* dapat menyelesaikan Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Nganjuk ini memuat tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi serta sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, dengan memperhatikan Standart Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Negeri Nganjuk juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dan menjadi dokumen yang penting bagi aparat jajaran Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB selama tahun anggaran 2022 untuk dapat melakukan evaluasi kinerja dan sebagai pembanding antara target dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2022. Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKjIP Tahun 2022, semoga bermanfaat dan berguna untuk Pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk dimasa yang lebih baik dimasa datang.

Nganjuk, 31 Januari 2024
Ketua

JAMUJI, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Nganjuk.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Nganjuk, 15 Februari 2024
Ketua Tim Reviu AKIP
Pengadilan Negeri Nganjuk,



Warsito, S.H.

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
 PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	v
		2. LKj telah menyampaikan informasi target kinerja	v
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	v
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pelaporan	v
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	v
		6. Telah meyajikan akuntabilitas keuangan	v
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	v
		2. Infromasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan infromassi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/infromasi disetiap unit kerja	v
		5. Data/infromasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit terkait	v
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi yang dibawahnya	v
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam lkj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam perjanjian kinerja	v
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	v
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
		4. Tujuan/sasarandalam LKj telah sesuai	v

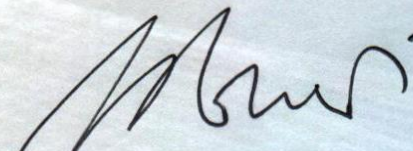
		dengan tujuan /sasaran dalam indikator kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	v
		6. Jika 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu,standart nasional dan sebagainay yang bermanfaat	v
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	v
		9. Jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai	v
		10. IKU dan IK telah SMART	v

Pereviu I



Warsito, S.H.

Nganjuk, 15 Februari 2024
Pereviu II



Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LKjIP PN. NGANJUK TAHUN 2023		ii
FORMULIR LKjIP TAHUN 2023		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GRAFIK		xii
DAFTAR GAMBAR		xiii
IKHTISAR EKSEKUTIF		xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
	C. Struktur Organisasi	3
	D. Permasalahan Utama (Strategic Issue).....	5
	E. Sistematika Laporan	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	7
	A. Rencana Strategis 2020 – 2024	7
	B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	7
	C. Rencana Kinerja Tahunan 2023.....	12
	D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
	A. Capaian Kinerja Organisasi	17
	A.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja	17
	A.2 Analisis Penggunaan Sumber Daya	102
	A.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	104
	B. Realisasi Anggaran	105
BAB IV	PENUTUP	109
	A. Simpulan	109
	B. Saran	109

	LAMPIRAN -LAMPIRAN	
1.	SK Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2023	
2.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk	
3.	Reviu IKU	
4.	Matrik Reviu Rencana Strategis 2020-2024	
5.	Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023	
6.	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
7.	Monitoring Dan Evaluasi LKjIP per Triwulan	



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan	3
Tabel 2.1. Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	9
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 2.3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	17
Tabel 3.2. Capaian target Kinerja Sasaran Strategi 1	21
Tabel 3.3. Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	22
Tabel 3.4. Capaian Target Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 -2023	23
Tabel 3.5. Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2022-2023	25
Tabel 3.7. Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	26
Tabel 3.8. Capaian Target Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2023	27
Tabel 3.9. Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	28
Tabel 3.10. Capaian Target Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2023	28
Tabel 3.11. Persentase Capaian Perkara Anak Yang Diselesaikan Diversi	30
Tabel 3.12. Pencapaian Capaian Target Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020-2023	31
Tabel 3.13. Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	32
Tabel 3.14. Pencapaian Target Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Periode Tahun 2020-2023	33
Tabel 3.15. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategi 2	34
Tabel 3.16. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	35
Tabel 3.17. Capaian Target Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Periode Tahun 2020 – 2023	35
Tabel 3.18. Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	37
Tabel 3.19. Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020 -2023	37
Tabel 3.20. Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020 -2023	38
Tabel 3.21. Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	29
Tabel 3.22. Persentase Capaian Target Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2020 -2023	29
Tabel 3.23. Persentase Capaian Target Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2020 -2023	41
Tabel 3.24. Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2020 -2023	41
Tabel 3.25. Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	42

Tabel 3.26 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	43
Tabel 3.27. Pencapaian Target Kinerja Persentase Pencari Keadilan Gol. Terentu Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2020 – 2022	43
Tabel 3.28. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 4	44
Tabel 3.29. Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti	45
Tabel 3.30. Pencapaian Target Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2020-2023	45
Tabel 3.31. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 5	47
Tabel 3.32. Daftar Nama Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan Manajerial	48
Tabel 3.33. Persentase Capaian Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial	49
Tabel 3.34. Pencapaian Target Kinerja Jumlah Pejabat Yang Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Periode Tahun 2022-2023	49
Tabel 3.35. Persentase Capaian Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian	51
Tabel 3.36 Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2023	53
Tabel 3.37. Persentase Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	53
Tabel 3.38. Jumlah Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2023	53
Tabel 3.39 Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2023	54
Tabel 3.40. Persentase Capaian Pengusulan Pensiun Tepat Waktu	55
Tabel 3.41. Jumlah Capaian Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2022-2023	55
Tabel 3.42 Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 6	56
Tabel 3.43. Capaian Target Kinerja Nilai LKJiP Pengadilan Negeri Nganjuk	57
Tabel 3.44. Capaian Nilai AKIP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020-2022	58
Tabel 3.45. Capaian Target Kinerja Predikat Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Pengadilan Negeri Nganjuk	60
Tabel 3.46. Hasil IPK Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi e- Survey Badilum	61
Tabel 3.47 Capaian Kinerja Hasil IPK	61
Tabel 3.48. Capain Nilai IPK Periode Tahun 2022-2023	61
Tabel 3.49. Hasil IKM Berdasarkan Aplikasi e- Survey Badilum Tahun 2023	62
Tabel 3.50 Capaian Kinerja Hasil IKM	63
Tabel 3.51. Capain Nilai IKM Periode Tahun 2022-2023	63
Tabel 3.52. Capaian Kinerja Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	64
Tabel 3.53. Capain Kinerja Predikat Akreditsi Penjaminan Mutu Periode Tahun 2022-2023	64
Tabel 3.54. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPN	65
Tabel 3.55. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPN Periode Tahun 2022 - 2023	66
Tabel 3.56. Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2023	67
Tabel 3.57. Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja	67
Tabel 3.58. Persentase Capaian Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2023	68
Tabel 3.59. Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu	69
Tabel 3.60. Capaian Kinerja Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2022-2023	70
Tabel 3.61. Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran	71
Tabel 3.62. Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 - 2023	71

Tabel 3.63. Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Nganjuk Tahun 2023	73
Tabel 3.64. Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja	73
Tabel 3.65. Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2022 – 2023	74
Tabel 3.66. Data Hukuman Disiplin Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2023	75
Tabel 3.67. Capaian Kinerja Pelanggaran Disiplin Tahun 2023	75
Tabel 3.68. Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Tahun 2022 – 2023	76
Tabel 3.69. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7	77
Tabel 3.70. Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan	78
Tabel 3.71. Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Diselesaikan Satuan Kerja Tahun 2022 – 2023	79
Tabel 3.72. Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai Tahun 2023	80
Tabel 3.73. Capaian Kinerja Jumlah Jumlah Kapasita Banwith Tahun 2022 – 2023	81
Tabel 3.74. Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2023	82
Tabel 3.75. Capaian Kinerja Jumlah Pendistribusian Surat Tahun 2022-2023	83
Tabel 3.76. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu	84
Tabel 3.77. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022-2023	84
Tabel 3.78. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2023	85
Tabel 3.79. Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang dapat Ditemukan Dengan Cepat Dan Mudah Tahun 2022-2023	86
Tabel 3.80. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait	87
Tabel 3.81. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2022-2023	87
Tabel 3.82. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media	88
Tabel 3.83. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat di Media Tahun 2022- 2023	88
Tabel 3.84. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan	89
Tabel 3.85. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2022-2023	90
Tabel 3.86. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2023	91
Tabel 3.87. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2022-2023	91
Tabel 3.88. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum	92
Tabel 3.89. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022-2023	92
Tabel 3.90. Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian	93
Tabel 3.91. Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian	94
Tabel 3.92. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung	95
Tabel 3.93. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2022 – 2023	95
Tabel 3.94. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	96
Tabel 3.95. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2022 – 2023	96
Tabel 3.96. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor	97
Tabel 3.97. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2022 – 2023	98

Tabel 3.98. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga	99
Tabel 3.99. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2022 – 2023	99
Tabel 3.100. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 8	100
Tabel 3.101. Capaian Kinerja Terpenuhi nya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	100
Grafik 3.102. Capaian Kinerja Terpenuhi nya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2023	101
Tabel. 3.103 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	102
Tabel 3.104. Pagu Dan Realisasi DIPA 01 dan Dipa 03 Tahun 2023	107
Tabel 3.105. Perbandingan Persentase Serapan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2020- 2023	108



DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2023	23
Grafik 3.2. Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorativ Tahun 2022-2023	25
Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2020-2023	27
Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2023	29
Grafik 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Periode Tahun 2020-2022	31
Grafik 3.6. Perbandingan Capaian Indexs Responden Pencari Keadilan Periode Tahun 2020-2023	33
Grafik. 3.7. Perbandingan Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Sampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Periode Tahun 2020-2023	36
Grafik 3.8. Perbandingan Capaian Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Medasi Periode Tahun 2020 - 2023	37
Grafik 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2020-2023	40
Grafik 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2020-2023	41
Grafik 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Periode Tahun 2020-2023	43
Grafik 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2020-2023	46
Grafik 3.13. Pencapaian Target Kinerja Jumlah Pejabat Yang Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Periode Tahun 2022-2023	50
Grafik 3.14. Pencapaian Target Kinerja Persentase Tingkat kelengkapan Data Kepegawaian Periode Tahun 2022-2023	52
Grafik 3.15. Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat WaktuTahun 2022-2023	54
Grafik 3.16 Perbandingan Capaian Nilai AKIP Pengadilan Negeri Nganjuk Periode Tahun 2020-2022	58
Grafik 3.17. Capaian Nilai IPK Periode Tahun 2022-2023	61
Grafik 3.18. Capaian Nilai IKM Periode Tahun 2020-2023	63
Grafik 3.19. Capain Kinerja Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu Periode Tahun 2022-2023	65
Grafik 3.20. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPN Periode Tahun 2022 – 2023	66
Grafik 3.21. Persentase Capaian Realisasi Anggaran BelanjaTahun 2022-2023	68
Grafik 3.22. Capaian Kinerja Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2022-2023	70
Grafik 3. 23 Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja AnggaranTahun 2022 – 2023	71
Grafik 3. 24 Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk KerjaTahun 2022 – 2023	74
Grafik 3. 25 Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Tahun 2022 – 2023	76
Grafik 3. 26 Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Diselesaikan Satuan Kerja Tahun 2022 – 2023	79

Grafik 3.27. Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith Tahun 2022 – 2023	81
Grafik 3.28. Capaian Kinerja Jumlah Pendistribusian Surat Tahun 2022 – 2023	83
Grafik 3.29. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat WaktuTahun 2022 – 2023	84
Grafik 3.30. Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang dapat Ditemukan Dengan Cepat Dan Mudah Tahun 2022 – 2023	86
Grafik 3.31. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antara Instansi Terkait Tahun 2022 – 2023	87
Grafik 3.33. Capaian Kinerja Jumlah Berita entang Satuan Kerja yang Dimuat Di Media 2022 – 2023	89
Grafik 3.33. Capaian Kinerja Jumlah Layanan PengadilanTahun 2022 – 2023	90
Grafik 3.34. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan PengadilanTahun 2022 – 2023	91
Grafik 3.35. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan HukumTahun 2022 – 2023	92
Grafik 3.36. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2022– 2023	94
Grafik 3.37. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2022 – 2023	95
Grafik 3.38. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah DinasTahun 2022 – 2023	97
Grafik 3.39. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin KantorTahun 2022 – 2023	98
Grafik 3.40. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah TanggaTahun 2022 – 2023	99
Grafik 3.41. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2023	101



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk	4
Gambar 3.1. Aplikasi SIKEP	50
Gambar 3.2. Monitoring Kelengkapan Data SIKEP	51
Gambar 3.3. Monitoring Kelengkapan E-DOC SIKEP	51
Gambar 3.4. Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas	57
Gambar 3.5. Piagam Penghargaan Peringkat ke 3 Pencapaian Nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terbaik di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya.	59
Gambar 3.6 . Aplikais Sinkronisasi SIPP Otomatis	78
Gambar 3.7. Grafik Laporan Ketersediaan Banwith Internet Tahun 2023	80



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengacu kepada visi misi yang Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis Pengadilan



Negeri Nganjuk Tahun 2020-2024 ditetapkanlah program penegakan dan pelayanan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Nganjuk sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang pada RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sedangkan program dukungan manajemen ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Nganjuk dengan sasaran yaitu:

1. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.
2. Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.
3. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima.
4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah system yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk adalah **108,18%**. Secara umum pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk telah berhasil mencapai target kinerja, namun tidak lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk sebesar

119,39%. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang tidak memenuhi capaian < 100%, yaitu pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan pada sasaran strategis mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik.

Untuk sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan capaian kinrejanya adalah sebesar 80 %. hal ini dikarenakan permohonan eksekusi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 10 perkara didaftarkan untuk permohonan eksekusi pada tahun ini dan terdapat sisa perkara permohonan pada tahun 2022 sebanyak 1 perkara, sedangkan eksekusi yang telah selesai dilaksanakan sebanyak 4 perkara. Untuk permohonan eksekusi lainnya, 3 permohonan eksekusi ditangguhkan, 2 karena ada bantahan, 1 ditangguhkan karena keinginan pemohon. 4 permohonan eksekusi lainnya dalam tahap rapat koordinasi tindak lanjut anmaning dan siap untuk pelaksanaan eksekusi.

Pada sasaran stategis mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya < 100% yaitu predikat pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, pada tahun 2023 Pengadilan Negei Nganjuk tidak dapat meraih WBK, jadi capaian kinerja pada indikator ini adalah 0%. Hal ini menjadi acuan untuk Pengadilan Negeri Nganjuk agar dapat berusah alebih keras untuk mendapatkan predikat WBK.

Laporan Kinerja tahun 2023 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2023

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
			1.	Pidana	100%	100%	100%
			2.	Perdata	70%	99,53%	142,19%
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	0%	-NA-
		c.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	92,96%	116,12%
		d.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	95,52%	106,13%
		e.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	70%	100%	142,86%
		f		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95,76%	106,4%
Rata- Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I							118,95%

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	100%	111,11%
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7%	9%	128,57%
Rata- Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II							119,84%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%	0%	--NA--
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%	0%	--NA--
		c.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata- Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%	40%	80%
Rata- Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV							80%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.		Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	80%	90%	112,5%
		b.		Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%	100%	100%
		c.		Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	100%	100%
		d.		Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%
Rata- Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis V							103,13%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.		Nilai LKJIP minimal “BB”	75(BB)	75,5	100%
		b.		Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK	-	0%
		c.		Nilai IPK	90%	98,65%	109,61%
		d.		Nilai IKM	90%	95,76%	106,4%
		e.		Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%
		f.		Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%
		g		Prosentase realisasi anggaran belanja	97%	97,30%	100,31%
		h		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	100%	105,26%
		i		Prosentase nilai Kinerja Anggaran	80%	95,35%	119,8%
		j		Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%	98,36%	103,53%
		k		Pelanggaran disiplin	1%	0%	100%

Rata- Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis VI							94,99%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretaraian yang baik dan prima	a.		Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
		b.		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps	100 Mbps	100%
		c		Prosentase distribusi surat	100%	100%	100%
		d		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e		Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	100%	111,11%
		f		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5	3	60%
		g		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	30 berita	180 berita	600%
		h		Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan	7 layanan	100%
		i		Jumlah pengguna layanan pengadilan	250 orang	649 orang	259,6%
		j		Jumlah layanan bantuan hukum	200 orang	240 orang	120%
		k		Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%
		l		Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2	3.000 m ²	100%
		m		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit	5 unit	100%
		n		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit	114 unit	100%
		0		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
Rata- Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis VII							137,45%
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.		Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam medukung pelayanan peradilan	90%	100%	111,11%
Rata- Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis VII							111,11%
Rata- Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2023							108,18%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Upaya Pengadilan Negeri Nganjuk kelas I B untuk mewujudkan terselenggaranya *Good Governace*, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 yang sistematis sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai lembaga peradilan dan

pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Negeri Diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 yaitu :

- a. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, (pasal 2)
- b. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, (pasal 3 ayat 1)
- c. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Negara tertinggi, (pasal 3 ayat 2)

2. Tugas Pokok

- a. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk.
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di Kabupten Nganjuk.

3. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB antara lain:

- a. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang menjadi kewenangan Peradilan tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Hakim, pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut hukum, administrasi peradilan dan non peradilan.
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar proses persidangan dapat

- diselenggarakan dengan mandiri, transparan dan akuntabel.
- d. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya.
 - e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
 - f. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan pelaksanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta memberikan informasi melalui website Pengadilan negeri Nganjuk yang dapat di akses oleh masyarakat sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. STRUKTUR ORGANISASI

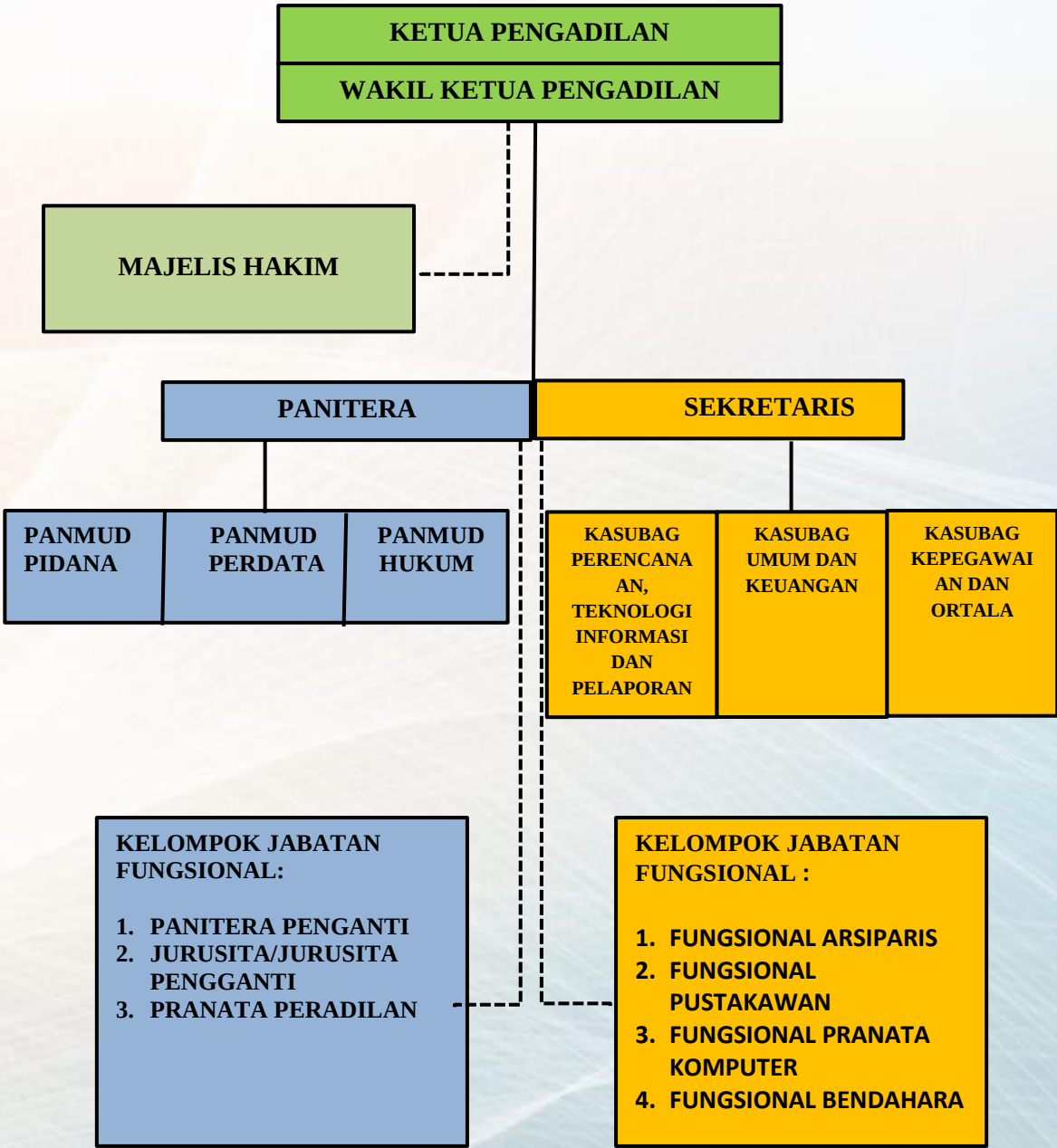
Struktur organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Perma No. 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi tersebut didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 37 Pegawai (Per 31 Desember 2022). Komposisi SDM yang dikelompokkan dalam jabatan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan.

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	6
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panitera Muda	3
7.	Kepala Sub. Bagian	3
8.	Panitera Pengganti	8
9.	Jurusita	2
10.	Jurusita Penganti	6

11.	Analisis Perkara Peradilan	1
12.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2
13.	Pengadministrasian Register Perkara	1
14.	Pengadministrasian persuratan	1
15.	Pengelola perkara	1
16.	Arsiparis Pelaksana	1
Jumlah SDM		38 Orang

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk



D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang Dihadapi Organisasi

a. Isu Internal

1. Aspek Proses Peradilan

Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena mediasi memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara .

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

a. Adanya kekurangan tenaga Staf untuk menangani administrasi perkara dan umumnya para Staf yang ada juga merangkap jabatan lain, selain itu tenaga honorer yang bertugas sebagai cleaning service juga diperbantukan di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan sehingga tidak dapat fokus pada satu pekerjaan;

b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB.

3. Aspek Sarana Dan Prasarana

Terdapat beberapa fasilitas yang belum bisa mendukung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

b. Isu eksternal

1. Aspek Proses Peradilan

a. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan perkara ;

b. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

a. Distribusi Hakim dan aparaturnya yang belum merata ;

b. Adanya rangkap pekerjaan antara staf dan jurusita pengganti.

3. Aspek Pembinaan Dan Pengawasan

Adanya program akreditasi dan pembanguna ZI yang dicanangkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yang menuntut agar jajaran dibawahnya selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

- a. Adanya peraturan perundang - undangan yang selalu berubah menuntut aparat peradilan agar selalu meng update peraturan terbaru demi kelancaran pekerjaan ;
- b. Balasan bantuan relaas delegasi ke Pengadilan luar yang dimintakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk datangnya sering tidak tepat waktu, sehingga pada waktu pemeriksaan dipersidangan belum diketahui apakah panggilan sudah dilaksanakan atau belum;
- c. Kurang tepat waktunya para pencari keadilan dalam mematuhi jadwal sidang.

5. Aspek Sarana Dan Prasarana

- a. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Nganjuk belum sesuai dengan kebutuhan rencana yang diajukan , sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kebutuhan kantor;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menambah kenyamanan para pencari keadilan.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Nganjuk.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan pemerintah. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI

Visi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB adalah

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
YANG AGUNG”**

Visi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi dalam melakukan aktifitasnya.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai berikut :

- 1) Menjaga KeMandirian Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB ;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB;
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB;

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparansi dan Akuntabel;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan ;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;

- 6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
- 7. Mewujudkan pelayanan kesekretaraiatan yang baik dan prima;
- 8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 – 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.1. Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung. 3. Persentase pekara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. 4. Persentase pekara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. 5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. 6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu. 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi para pencari keadilan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum).
Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	1. Persentase pejabat yang sudah memenuhi standard kompetensi jabatan manajerial. 2. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian. 3. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu. 4. Persentase pengusulan pensiun tepat waktu.
Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1. Nilai LKJIP minimal BB 2. Predikat pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. 3. Nilai IPK. 4. Nilai IKM. 5. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu. 6. Persentase realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 7. Persentase realisasi anggaran belanja. 8. Persentase pelaporan LHKPN dan LHK-ASN tepat waktu. 9. Persentase nilai kinerja anggaran. 10. Persentase kedisiplinan masuk kerja 11. Pelanggaran disiplin.
Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	1. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan. 2. Persentase kedisiplinan masuk kerja 3. Persentase distribusi surat. 4. Persentase tindak lanjut surat tepat waktu. 5. Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. 6. Jumlah kerjasama antara instansi terkait. 7. Jumlah berita tentang satker yang dimuat di media. 8. Jumlah layanan pengadilan. 9. Jumlah pengguna layanan pengadilan. 10. Jumlah layanan bantuan hukum. 11. Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian. 12. Jumlah pemeliharaan gedung. 13. Jumlah pemeliharaan rumah dinas. 14. Jumlah pemeliharaan

		peralatan/mesin kantor.
		15. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga.
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk dan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Pokok

- a. Layanan Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
- b. Layanan Perkantoran: Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraa Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
- c. Layanan Sarana Internal
- d. Layanan Prasarana Internal

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan
- b. Mewujudkan pelayanan kesekretariaitan yang baik dan prima.
- c. Pemenuhan kebutuahan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok :

- a. Percepatan Penyelesaian Perkara
- b. Perkara Pidana yang diselesaikan Ditingkat Pertama
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja			Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
			1.	Pidana	100%
			2.	Perdata	70%
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%
		c.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		d.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	70%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		a.		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	b.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7%
		a.		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
		c.		Persentase pencari keadilan golongan	100%

				tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.		Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	80%
		b.		Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%
		c.		Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.		Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.		Nilai LKJIP minimal “BB”	75
		b.		Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.		Nilai IPK	90%
		d.		Nilai IKM	90%
		e.		Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.		Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.		Prosentase realisasi anggaran belanja	97%
		h.		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i.		Prosentase nilai Kinerja Anggaran	80%
		j.		Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%
		k.		Pelanggaran disiplin	1%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a.		Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1 aplikasi
		b.		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c.		Prosentase distribusi surat	100%
		d.		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e.		Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%
		f.		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5
		g.		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	30 berita
		h.		Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan
		i.		Jumlah pengguna layanan pengadilan	250 orang
		j.		Jumlah layanan bantuan hukum	200 orang

		k	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjajian Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Berdasarkan Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, amka Pengadilan Negeri Nganjuk perlu melakukan reviu terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2022, yang sasaran dan indicator kinerjanya diselaraskan dengan surat keputusan penetarap IKU terbagu dari Sekma tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja			Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
			1.	Pidana	100%
			2.	Perdata	70%
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%
		c.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		d.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	70%
		f.		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
		c.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.		Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	80%
		b.		Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%
		c.		Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.		Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.		Nilai LKJiP minimal “BB”	75
		b.		Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK
		c.		Nilai IPK	90%
		d.		Nilai IKM	90%
		e.		Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.		Prosentase realisasi Penerimaan	100%

				Negara Bukan Pajak (PNBP)	
		g		Prosentase realisasi anggaran belanja	97%
		h		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i		Prosentase nilai Kinerja Anggaran	80%
		j		Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%
		k		Pelanggaran disiplin	1%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a.		Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1 aplikasi
		b.		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c		Prosentase distribusi surat	100%
		d		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e		Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%
		f		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5
		g		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	30 berita
		h		Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan
		i		Jumlah pengguna layanan pengadilan	250 orang
		j		Jumlah layanan bantuan hukum	200 orang
		k		Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l		Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2
		m		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit
		n		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit
		o		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.		Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan anggaran dengan total pagu Rp. 6.470.077.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A. 1 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2023 dengan realisasinya. Adapun forlulasi capain kinerja adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA

Realisasi

Target

X 100%

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2023 adalah sebesar **108,18%**.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja tersebut dapat diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Persentase capaian kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
			1.	Pidana	100%	100%	100%
			2.	Perdata	70%	99,53%	142,19%
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	0%	-NA-
		c.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	92,96%	116,12%

		d.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	95,52%	106,13%
		e.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	70%	100%	142,86%
		f.		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95,76%	106,4%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	100%	111,11%
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7%	9%	128,57%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%	0%	--NA--
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%	0%	--NA--
		c.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%	40%	80%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.		Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	80%	90%	112,5%
		b.		Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%	100%	100%
		c.		Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	100%	100%
		d.		Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.		Nilai LKJiP minimal "BB"	75(BB)	75,5	100%
		b.		Predikat Pembangunan Zona	WBK	-	0%

				Intergritas. WBK / WBBM			
		c.		Nilai IPK	90%	98,65%	109,61%
		d.		Nilai IKM	90%	95,76%	106,4%
		e.		Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%
		f.		Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%
		g.		Prosentase realisasi anggaran belanja	97%	97,30%	100,31%
		h.		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	100%	105,26%
		i.		Prosentase nilai Kinerja Anggaran	80%	95,35%	119,8%
		j.		Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%	98,36%	103,53%
		k.		Pelanggaran disiplin	1%	0%	100%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariaian yang baik dan prima	a.		Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
		b.		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps	100 Mbps	100%
		c.		Prosentase distribusi surat	100%	100%	100%
		d.		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e.		Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	100%	111,11%
		f.		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5	3	60%
		g.		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	30 berita	180 berita	600%
		h.		Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan	7 layanan	100%
		i.		Jumlah pengguna layanan pengadilan	250 orang	649 orang	259,6%
		j.		Jumlah layanan bantuan hukum	200 orang	240 orang	120%
		k.		Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%

		l		Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m ²	3.000 m ²	100%
		m		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit	5 unit	100%
		n		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit	114 unit	100%
		o		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.		Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%	100%	111,11%
Capaian Kinerja Tahun 2023							108,18%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Startegis 1 : Terwujudnya peradilan yang pasti, trasparan dan akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
	1. Pidana	100%	100%	100%
	2. Perdata	70%	99,53%	142,19%
2.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	0%	-NA-
3.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	92,96%	116,12%
4.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	95,52%	106,13%
5.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	70%	100%	142,86%
6.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95,76%	106,4%
RATA RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				118,95%

Dari Tabel 3.2. didapatkan rata – rata capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebesar **118,95%**.

Capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ini lebih tinggi dari capaian tahun 2022 , dimana pada tahun 2022 capaian kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 60,31%, mengalami kenaikan sebesar 58,64%. Kenaikan tersebut sangat signifikan dikarenakan untuk indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan resoratif tidak diperhitungkan dalam persentase capaian kinerja.

Analisis Sasaran Strategis I

1. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu.

- Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Untuk perkara perdata, dari 214 jumlah perkara yang diselesaikan, 213 perkara diselesaikan tepat waktu, jadi persentase relaisasi capaian tahun 2023 sebesar 99,53%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk perkara pidana, dari 255 jumlah perkara yang diselesaikan , 255 perkara diselesaikan tapat waktu, jadi persentase realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%, sesuai target yangtelah ditetapkan.

Tabel 3.3. Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

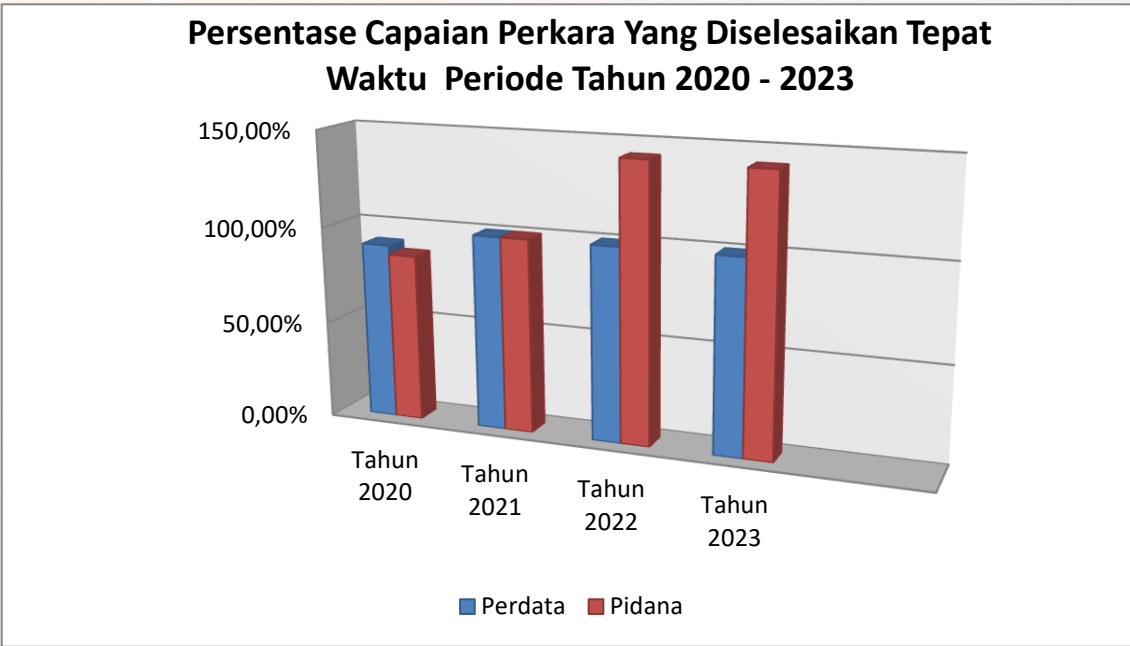
Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			2021	2022	2023
1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	70%	99,53%	100%	142,85%	142,19%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesiakan tepat waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.4. Capaian Target Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 -2023

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2023	Perdata	214	213	100%	100%	100%
	Pidana	255	255	70%	99,53%	142,19%
2022	Perdata	289	289	100%	100%	100%
	Pidana	384	384	70%	100%	142,85%
2021	Perdata	239	239	100%	100%	100%
	Pidana	334	334	100%	100%	100%
2020	Perdata	213	184	100%	91,02%	91,02%
	Pidana	412	375	100%	86,38%	86,38%

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2023



Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Perhitungan indikator kinerja penyelesaian perkara tepat waktu dihitung sejak mediasi gagal atau semenjak gugatan dibacakan. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi khususnya pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) serta pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding . Pada tahun 2023 terdapat satu perkara

perdata yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mendapatkan panggilan assessment Calon Hakim Tinggi Pengawas dan terkedala kesehatan. Meskipun demikian, capaian kinerja pada tahun 2023 untuk indikator ini adalah BAIK, karena capaian kinerja pada tahun ini diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan dengan baik.

Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk yaitu diantaranya:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara , sejak perkara masuk hingga putus melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara lewat WA grub setiap pagi oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk.
3. Dalam pelaksanaan rapat pembinaan dan pengawasan dan rapat-rapat insidentil, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk selalu menghimbau kepada seluruh hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku.
4. Penerapan SOP penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan.
5. Adanya inovasi pengiriman soft copy dakwaan dan tuntutan melalui aplikasi ASTRAL sehingga mempercepat distribusi soft file dari kejaksaan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk percepatan penyelesaian perkara.
6. Adanya inovasi SEDUDO yang merupakan asisten digital sebagai pengingat kinerja aparaturnya dalam penyelesaian perkara.

2. Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

- Indikator persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung dihitung dari perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.
- Penerapan Restoratif justice di lingkungan Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan Restoratif Justice .
- Perkara yang diajukan untuk restorative justice adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Perkara yang diselesaikan dengan restoratif

Perkara yang diajukan untuk restoratif

x 100%

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Nganjuk tidak terdapat perkara yang diajukan melalui pendekatan restorative justice, jadi realisasi persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah 0%.

Tabel 3.5. Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
			2022	2023
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	0%	0%	0%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative tahun 2022 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorativ Tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan Dengan restorative	Jumlah Perkara Yang diajukan restorative	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	2%	0%	0%
2022	0	0	1%	0%	0%

Grafik 3.2. Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorativ Tahun 2022-2023



3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

- Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Untuk perkara perdata, dari 214 perkara yang diputus, yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 197 perkara, sedangkan untuk perkara pidana, dari 255 perkara pidana yang putus, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 239 perkara.

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang putus, baik pidana dan perdata adalah 469 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 436. Target pada indikator ini adalah 80%, sedangkan realisasinya adalah 92,96 %, sehingga capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 116,2%.

Tabel 3.7. Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	92,96%	107,51%	121,70%	116,2%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.8. Capaian Target Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
2023	469	436	80%	92,96%	116,2%
2022	682	664	80%	97,36%	121,70%
2021	573	557	90%	96,76%	107,51%
2020	562	540	94%	96,08%	102,21%

Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2020-2023



Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 121,70% menjadi 116,2 % (1,04%). Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat 19 perkara pidana yang mengajukan banding, sedangkan untuk perkara perdata terdapat 17 perkara yang menyatakan banding. Angka ini memang menunjukkan kenaikan jumlah perkara yang menyatakan banding dimana pada tahun 2022 dari 682 perkara putus,18 perkara menyatakan banding , namun jika dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perkara yang putus, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk cukup tinggi.

4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

- Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah PerkaraYang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

X100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Untuk perkara perdata, dari 214 perkara yang diputus, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 197 perkara. Untuk perkara pidana, dari 255 perkara pidana yang putus, 251 perkara menyatakan kasasi, jadi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 469 perkara.

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang putus, baik pidana dan perdata adalah 469 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 448. Target pada indikator ini adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 95,52 %, sehingga capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 106,13%.

Tabel 3.9. Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	95,52%	103,05%	108,17%	106,13%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.10. Capaian Target Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2023	469	448	90%	95,52%	106,13%
2022	682	664	90%	97,36%	108,17%
2021	573	563	95%	97,90%	103,05%
2020	562	547	94%	96,98%	103,17%

Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2023



Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa rata-rata persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,04%, dimana pada tahun 2022 capaian pada indikator ini yaitu 108,17% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 106,13%, Namun jika dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi (21 perkara) sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perkara yang putus (469 perkara), hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk cukup tinggi.

Upaya Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan persentase perkara tidak mengupayakan upaya hukum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Nganjuk mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial.
2. Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain.
4. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk menghimbau untuk memaksimalkan keberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian perkara Perdata.

5. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi.

- Indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.
- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Penanganan diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan Formulasi sebagai berikut:

Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, perkara pidana anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Nganjuk sebanyak 9 perkara. Dari 9 perkara pidana anak tersebut, 1 perkara diajukan diversi dan untuk sisa perkara lainnya tidak dapat diajukan diversi karena ancaman hukumannya diatas 7 tahun. Perkara pidana anak yang diajukan diversi dinyatakan berhasil , jadi realisasi untuk tahun 2023 adalah 100%

Target tahun 2023 untuk penyelesaian perkara anak melalui diversi adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja tahun 2023 adalah 142,86%

Tabel 3.11. Persentase Capaian Perkara Anak Yang Diselesaikan Diversi

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase perkara anak yang diselesaikan diversi	70%	100%	0%	142,86%	142,86%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi antara tahun 2020-2023 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.12. Pencapaian Capaian Target Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah perkara diversi	Jumlah Perkara Diversi Dinyatakan Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
2023	9	1	1	70%	100%	142,86%
2022	18	1	1	70%	100%	142,86%
2021	16	0	0	15%	0%	0%
2020	13	2	2	10%	15,38%	153,8%

Grafik 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Periode Tahun 2020-2022



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi capaian kinerjanya sangat baik , namun apabila dilihat dari jumlah perkara anak yang dapat didiversi cenderung kecil atau tidak ada sama sekali, hal ini disebabkan karena beberapa hal diataranya:

1. Penyelesaian perkara diversi telah dilaksanakan di tingkat penyidikan maupun penuntutan.
2. Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk penyelesain perkara dengan diversi adalah sebagai berikut:

1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi.
2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.

6. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

- Indikator Kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan perhitungannya disesuaikan dengan PERMENPAN no. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi internal harus ≥ 80.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.13. Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No.	Peroide	Jumlah Responden	Hasil Survei	Keterangan
1.	Triwulan I (Januari- Maret)	158	93,53%	Sangat Baik
2.	Triwulan II (April - Juni)	161	97,57%	Sangat Baik
3.	Triwulan III (Juli - September)	169	95,51%	Sangat Baik
4.	Triwulan IV (Oktober- Desember)	167	96,49%	Sangat Baik
Rata- Rata			95,76%	

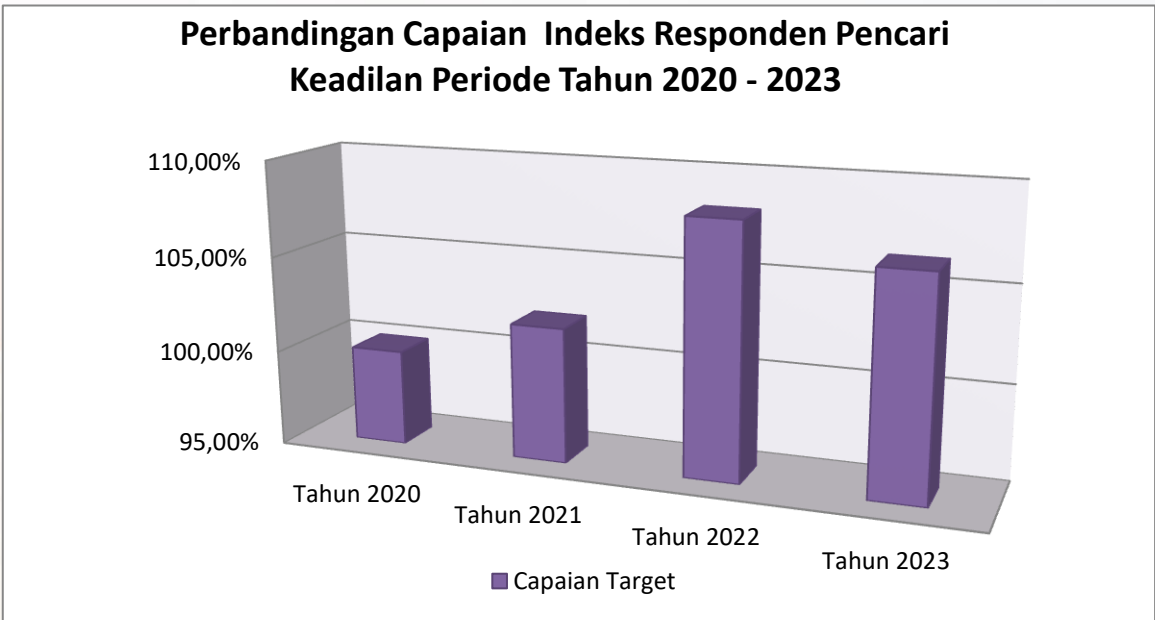
Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2023 adalah 90%, seangkan realisasinya adalah 95,76% sehingga Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 106,4%,

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan periode tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.14. Pencapaian Target Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Periode Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	90%	95,76%	106,4%,
2022	90%	97,32%	108,17%,
2021	90%	91,86%	102,06%
2020	85%	85,10%	100%

Grafik 3.6. Perbandingan Capaian Indexs Responden Pencari Keadilan Periode Tahun 2020-2023



Grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya persentase indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,77% dari capaian tahun 2022 sebesar 108,17% menjadi 106,4% pada tahun 2023. Meskipun demikian, hasil survey Kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2023 berkategori SANGAT BAIK, Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan peradilan maupun pelayanan PTSP diantaranya:

1. Memberikan pelatihan bagi petugas PTSP tentang pelayanan prima, bekerjasama dengan Bank BTN.
2. Menyediakan petugas pada pojok e-court untuk melayani pihak yang berperkara melalui e-court.
3. Menyediakan mesin EDC pada kasir untuk pembayaran perkara perdata.
4. Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang waktu layanan dan jenis layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk

- Menyediakan kompensasi pelayanan bagi pengguna pengadilan apabila layanan yang diberikan pada PTSP tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana penyanggah difabel.
- Menyediakan ruang tunggu PTSP yang nyaman bagi pengunjung.

Sasaran Startegis 2 : Peningkatan Efektifitas Penyelesaian
Pengelolaan Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase salinan putusan yang sampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	9%	128,57%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				119,84%

Analisis Sasaran Strategis II

- Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan Ke Para Pihak Tepat Waktu**
 - Indikator kinerja persentase salinan putusan yang sampaikan kepara pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.
 - Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Sema Nomor 1 tahun 2011 yaitu paling lambat 14 hari setelah putusan dibacakan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu

Jumlah Putusan

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, dari 255 perkara pidana dan 214 perkara perdata yang putus, salinan putusannya semuanya telah dikirimkan tepat waktu, sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100%

Target kinerja pada indikator persetae salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak adalah 100%, sedangkan realisasinya dalah 100%, ini berarti capain kinerja indikator ini adalah sebesar 100%.

Tabel 3.16. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

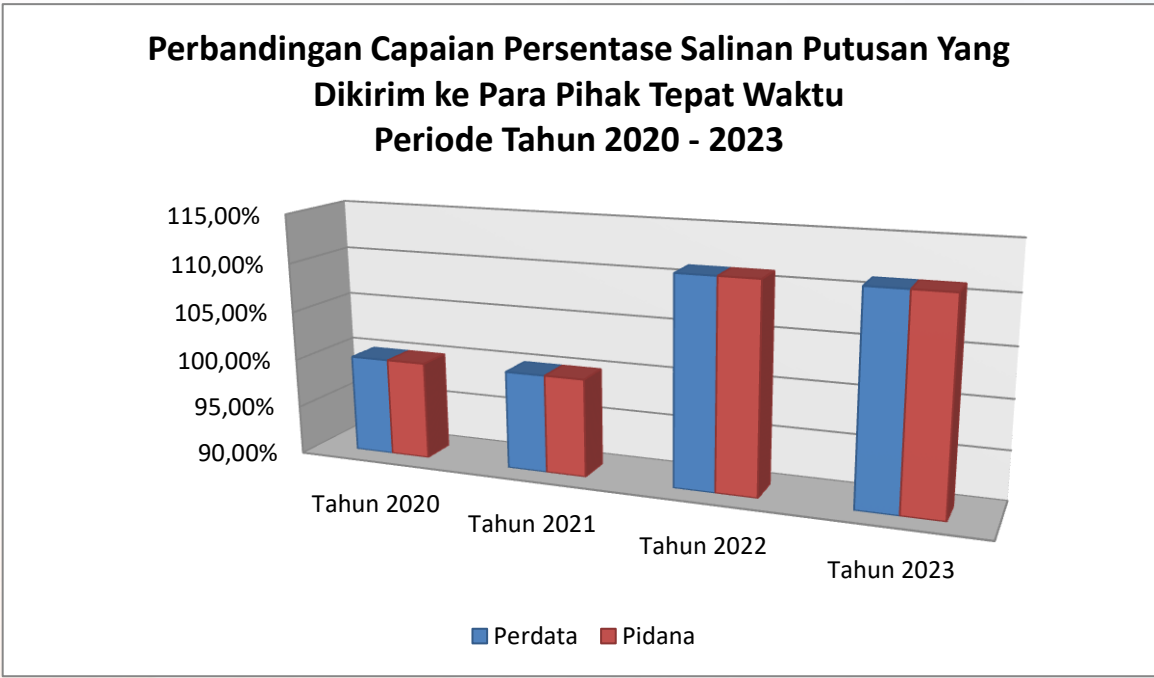
Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase salinan putusan yang di sampaikan ke pada pihak tepat waktu	90%	100%	100%	111,11%	111,11%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu periode tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17. Capaian Target Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Periode Tahun 2020 – 2023

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
2023	Perdata	298	298	90%	100%	111,11%
	Perdata	298	298	90%	100%	111,11%
2022	Perdata	298	298	90%	100%	111,11%
	Pidana	384	384	90%	100%	111,11%
2021	Perdata	239	239	100%	100%	100%
	Pidana	334	334	100%	100%	100%
2020	Perdata	184	184	100%	100%	100%
	Pidana	375	375	100%	100%	100%

Grafik. 3.7. Perbandingan Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Sampai ke Para Pihak Tepat Waktu Periode Tahun 2020-2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023, persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Ngajuk dalam pengiriman salinan putusan tidak dapat diragukan lagi. Semua ini tidak terlepas dari upaya Pengadilan Negeri Nganjuk untuk selalu meningkatkan kredibilitasnya dalam hal pengiriman salinan putusan dan upaya yang dilakukan diantaranya adalah pengiriman salinan putusan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dilakukan melalui kurir sehingga segera terkirim, selain itu, salinan putusan untuk perkara perdata dilaksanakan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti dengan sistem bergilir sehingga pembagian pengiriman salinan putusa oleh Jurusita / Jurusita pengganti dilaksanakan secara adil.

2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

- Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Prosedur mediasi di Pengadilan mengacu pada Perma nomor 1 Tahun 2016.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil

Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, dari 33 perkara perdata yang di lakukan mediasi, 3 diantaranya berhasil, sehingga realisasi pada indikator ini adalah 9 %.

Target untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 7%, sedangkan realisasinya adalah sebesar 9%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 128,57%.

Tabel 3.18. Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	9%	100%	204,14%	128,57%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.19. Persentase Capaian Terget Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020 -2023

Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2023	33	3	7%	9%	128,57%
2022	35	5	7%	14,29%	204,14%
2021	39	4	10%	10,25%	100%
2020	45	8	15%	17,78%	118,53%

Grafik 3.8. Perbandingan Capaian Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020 - 2023



Dari grafik diatas dapt kita lihat bahwa secara umum pencapaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun ke tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat,namun pada tahun 2023 capaian kinerja pada indikator ini menuru sebesar 75,57%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

- 1. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- 2. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada pendapatan yang mereka peroleh dari klien.
- 3. Kurangnya pemahaman dari para pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Negeri Nganjuk tetap melakukan upaya untuk penyelesaian perkara melalui mediasi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi diantaranya:

- 1. Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai daan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.
- 2. Hakim mediator mengupayakan agar perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dielesaikan melalui jalan mediasi.

Sasaran Startegis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20. Capaian Target Knerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%	0%	0%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%	0%	0%
3.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				100%

Analisis Sasaran Strategis III

1. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

- Indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.
- Penyelesaian perkara secara prodeo diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga persentase realisasi pada indikator ini adalah 0%.

Tabel 3.21. Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2022	2023
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan		01%	0%	0%	0%	0%

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 0 %, berbanding lurus dengan capaian pada 2 dua tahun sebelumnya, dimana target untuk penyelesaian perkara prodeo tidak dapat direalisasikan karena pada tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk. Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.22. Persentase Capaian Target Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2020 -2023

Tahun	Jumlah Perkara prodeo	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2022	0	0	1%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%

2021	0	0	100%	0%	0%
2020	0	0	100%	0%	0%

Grafik 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2020-2023



2. Persentase Perkara Yang Diselesiakan di Luar Gedung Pengadilan.

- Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Berdasarkan SE Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 202 tentang pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, Sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana, seperti, permohonan ganti nama, ijin menikah, anak angkat, akta kelahiran terlambat, perbailakn kesalahan dalam akta kelahiran.

Dengan Formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, jadi untuk realisasi tahun ini adalah 0%.

Tabel 3.23. Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	01%	0%	0%	0%	0%

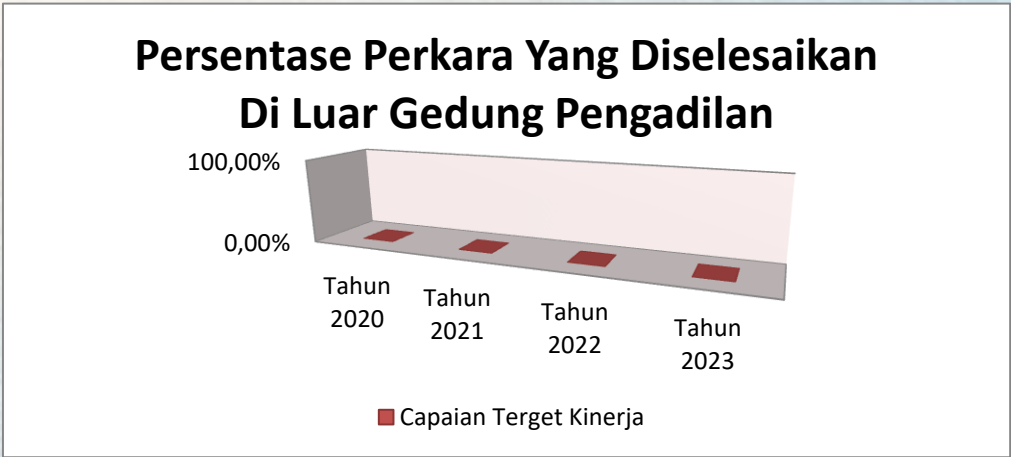
Target pada indikator ini adalah 0%, sedangkan realisainya 0 %, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah sebesar 0%.

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan yang diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.24. Persentase Capaian Terget Kinerja Perkara Yang Diselesaikan DiLuar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2020 -2023

Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	1%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	100%	0%	0%
2020	0	0	100%	0%	0%

Grafik 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2020-2023



3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

- Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah Permohonan layanan hukum .
- Pelaksanaan Posbakum di pengadilan diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Dengan Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah 240 orang, sedangkan jumlah permohonan layanan hukum yang diajukan pada posbakum adalah 240 orang, sehingga realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100 %.

Berikut ini adalah laporan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B:

Tabel 3.25. Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

NO.	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	20 orang
2.	Pebruari	20 orang
3.	Maret	20 orang
4.	April	22 orang
5.	Mei	20 orang
6.	Juni	20 orang
7.	Juli	20 orang
8.	Agustus	20 orang
9.	September	20 orang
10.	Oktober	20 orang
11.	Nopember	20 orang
12.	Desember	20 orang
Jumlah Total		240 orang

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum di targetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100 %, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.26. Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan target , realisasi dan capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.27. Pencapaian Target Kinerja Persentase Pencari Keadilan Gol. Terentu Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2020 - 2022

Tahun	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2023	240	240	100%	100%	100%
2022	240	240	100%	100%	100%
2021	242	242	100%	100%	100%
2020	84	84	100%	100%	100%

Grafik 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Periode Tahun 2020-2023



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan golongan tertentu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam memberikan pelayanan terbaik yaitu diantaranya, Pengadilan Negeri Nganjuk telah menanda tangani MOU dengan lembaga bantuan hukum POSBAKUMADIN dan memberikan tempat yang representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan advise hukum dan pendampingan terdakwa selama persidangan terhadap orang kurang mampu dan sosialisasi adanya layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Nganjuk melalui website.

Sasaran Startegis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%	40%	80%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				80%

Analisis Sasaran Strategis IV

1. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi).

- Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun 2023.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan

Jumlah Permohonan Eksekusi

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, terdapat 10 perkara permohonan eksekusi yang diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk, dan 4 perkara telah selesai di tindak lanjuti, jadi realisasi pada indikator ini adalah 40%.

Target pada indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 50%, sedangkan realisasinya adalah 80%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 200 %.

Tabel 3.29. Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	50%	40%	80%	200%	80%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.30. Pencapaian Target Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2020-2023

Tahun	Jumah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
2023	10	4	50%	40%	80%
2022	2	2	50%	100%	200%
2021	5	3	75%	60%	80%
2020	4	0	80%	0%	0%

Grafik 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2020-2023



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti periode 2020 sampai dengan 2022 mengalai peningkatan, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 120 %, hal ini dikarenakan permohonan eksekusi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 10 perkara didaftarkan untuk permohonan eksekusi pada tahun ini dan terdapat sisa perkara permohonan pada tahun 2022 sebanyak 1 perkara, sedangkan eksekusi yang telah selesai dilaksanakan sebanyak 4 perkara. Untuk permohonan eksekusi lainnya, 3 permohonan eksekusi ditangguhkan, 2 karena ada bantahan, 1 ditangguhkan karena keinginan pemohon. 4 permohonan eksekusi lainnya dalam tahap rapat koordinasi tindak lanjut anmaning dan siap untuk pelaksanaan eksekusi.

Upaya – upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi adalah:

1. Aktif menanyakan kepada para pihak melalui surat apakah permohonan eksekusi ditindaklanjuti, di cabut atau ditangguhkan.
2. Mengundang para pihak untuk melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan permohonan ekseskusi yang diajukan apakah pihak serius dengan permohonannya.
3. Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi.

Sasaran Startegis 5 : Mewujudkan Manajemen SDM Yang Profesional Dan Berkesinambungan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	80%	90%	112,5%
2.	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%	100%	100%
3.	Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	100%
4.	Persentase pengsulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				103,13%

Analisis Sasaran Strategis V

1. Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial.

- Indikator Kinerja Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial adalah perbandingan antara jumlah pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial dengan jumlah pemangku jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Nganjuk.
- Standart kompetensi jabatan manajerial dilihat dari pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh personil yang telah menduduki jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Nganjuk.
- Jabatan Manajerial di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Panitera.
 - d. Sekretaris.
 - e. Panitera Muda Pidana.
 - f. Panitera Muda Perdata.
 - g. Panitera Muda Hukum .

- h. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana.
- j. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial}}{\text{Jumlah Pemangku Jabatan}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Pada tahun 2022, jumlah Jabatan Manajerial yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk berjumlah 10 orang, sedangkan yang telah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial adalah 8 orang, sehingga realisasinya mencapai 80%.

Berikut data Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan stadart kompetensi jabatan yang dimiliki:

Tabel. 3.32. Daftar Nama Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan Manajerial

No.	Nama	Jabatan	Diklat Manajerial Yang Pernah diikuti	Tahun Pelaksanaan Diklat
1.	Jamuji, SH	Ketua	Bimtek Hakim	2013
2.	Warsito, SH	Wakil Ketua	Diklat Pimpinan Pengadilan	2018
3.	Ivan Endah Dayatra, SH, MH	Panitera	Pelatihan Teknis Fungsional PP	2022
4.	Ari Efendi, SH	Sekretaris	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2020
5.	Agus Prasetyo, SH.	Panmud Perdata	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Peradilan Umum	2020
6.	Mujiono, SH, MH	Panmud Pidana	Bimtek Panitera Pengganti	2012
8.	Pujiyati, SH,MH	Panmud Hukum	Bimtek Panitera Pengganti	2015
8.	Ratih Dwi Anggraeni, SE	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2020
9.	Kamiran Sudiadi, SH	Kasubag.	Diklat Pim IV	2015

		Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana		
10.	Ivan Daniel Tentua, SE	Kasubag. Umum Dan Keuangan	-	-

Capaian Kinerja pada indikator persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.33. Persentase Capaian Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	80%	80%	100%	112,5%

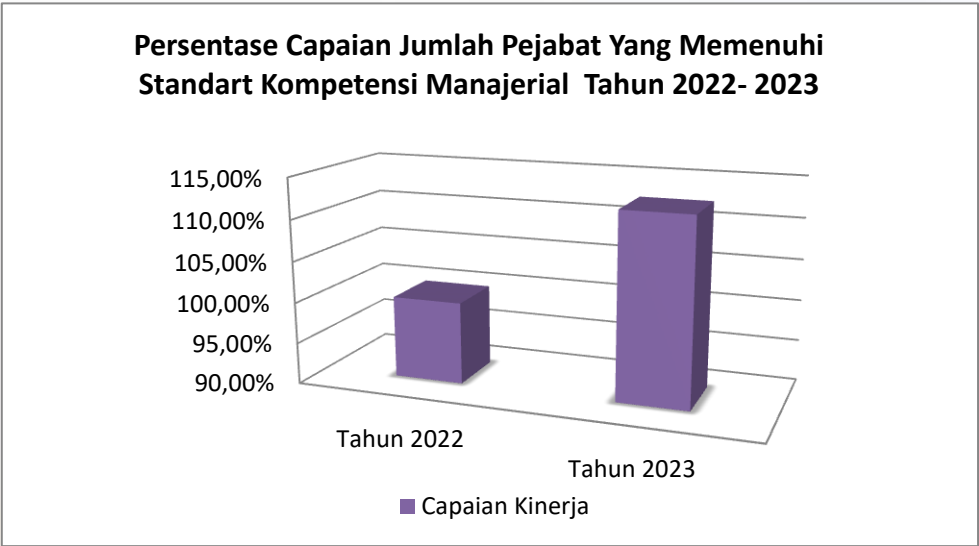
Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial di targetkan 80 %, sedangkan realisasinya adalah 90%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 112,5%, melebihi target yang ditetapkan.

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.34. Pencapaian Target Kinerja Jumlah Pejabat Yang Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Periode Tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah Pejabat PN Nganjuk	Jumah Pejabat Yang memenuhi standart Kompetensi Jabatan Manajerial	Target	Realisasi	Capaian
2023	10	9	80%	90%	112,5%
2022	10	8	80%	80%	100%

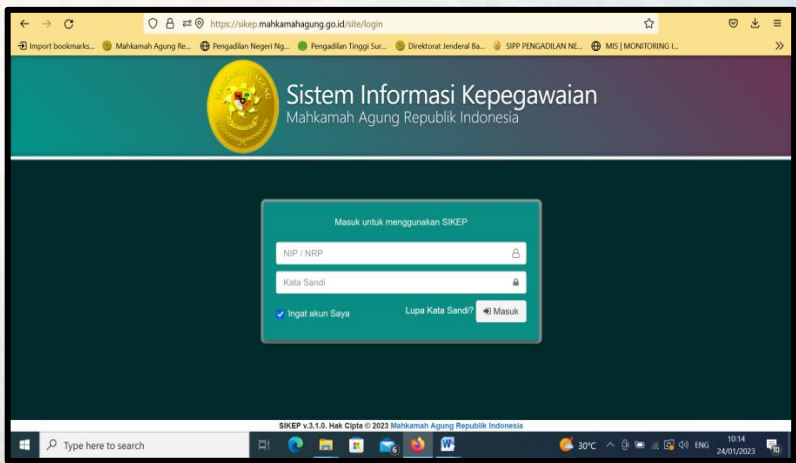
Grafik 3.13. Pencapaian Target Kinerja Jumlah Pejabat Yang Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Periode Tahun 2022-2023



2. Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kpegawaian.

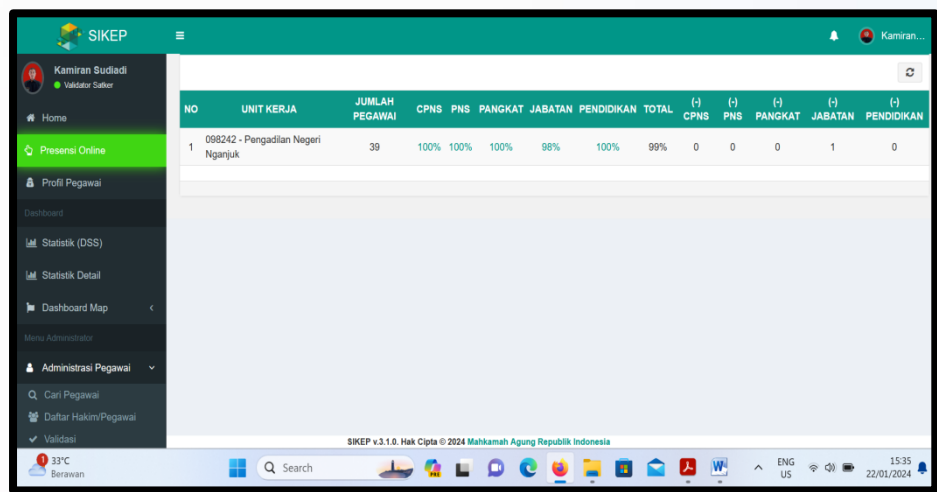
- Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*).
- Indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawain dapat dilihat pada aplikasi SIKEP Pengadilan Negeri Nganjuk dengan alamat website sikep.mahkamahagung.go.id

Gambar 3.1. Aplikasi SIKEP



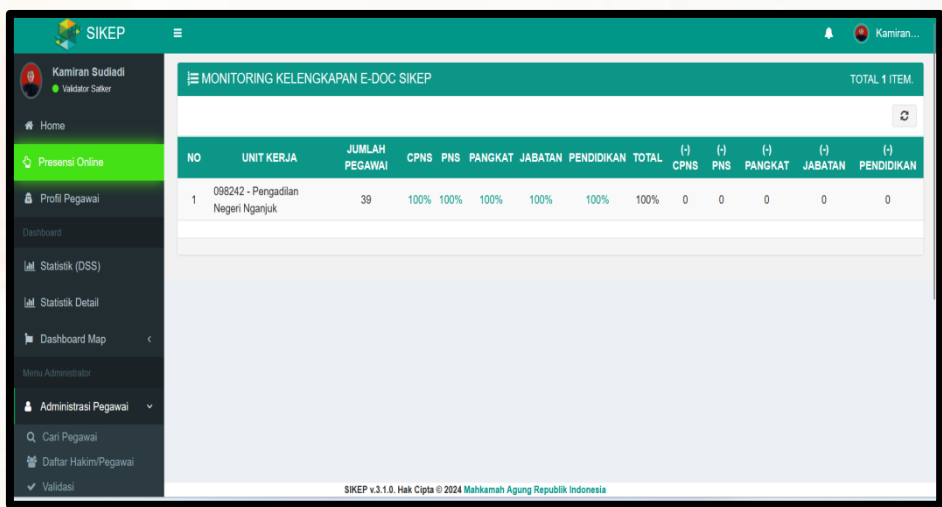
Apabila dilihat dari monitoring kepegawaian dari aplikasi SIKEP tahun 2023, baik pada monitoring kelengkapan data maupun kelengkapan e-doc, kelengkapan data SIKEP Pengadilan Negeri Nganjuk menunjukkan angka 100%, dengan demikian, realisasi pada indikator ini tercapai yaitu sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.2. Monitoring Kelengkapan Data SIKEP



NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	CPNS	PNS	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN	TOTAL	(-) CPNS	(-) PNS	(-) PANGKAT	(-) JABATAN	(-) PENDIDIKAN
1	096242 - Pengadilan Negeri Nganjuk	39	100%	100%	100%	98%	100%	99%	0	0	0	1	0

Gambar 3.3. Monitoring Kelengkapan E-DOC SIKEP



NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	CPNS	PNS	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN	TOTAL	(-) CPNS	(-) PNS	(-) PANGKAT	(-) JABATAN	(-) PENDIDIKAN
1	096242 - Pengadilan Negeri Nganjuk	39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0

Capaian Kinerja pada indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

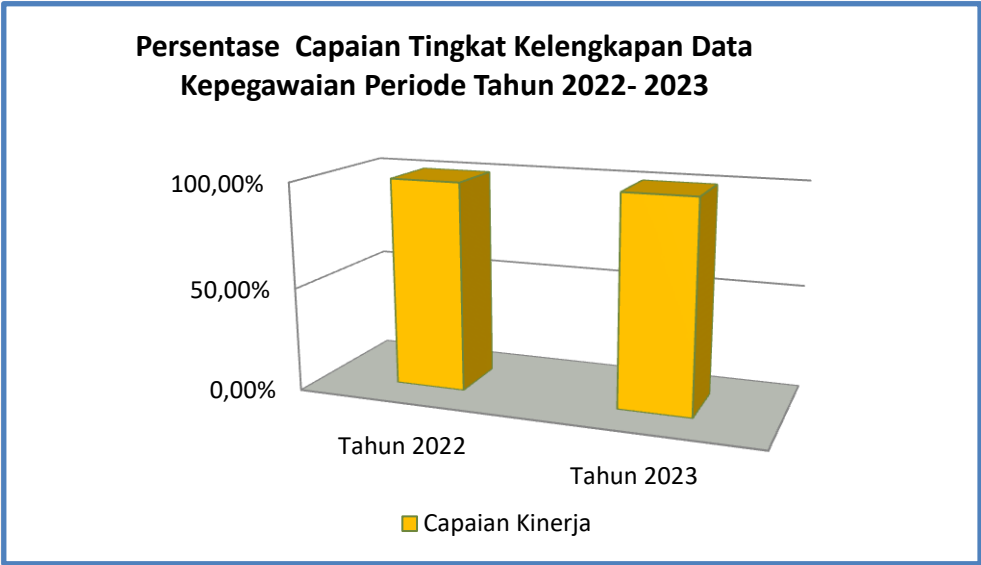
Tabel 3.35. Persentase Capaian Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1	Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian	100%	100%	100%	100%

Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian ditargetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 %. Hal ini menandakan bahwa tingkat kelengkapan data kepegawaian di Pengadilan Negeri Nganjuk telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat grafik berikut :

Grafik 3.14. Pencapaian Target Kinerja Persentase Tingkat kelengkapan Data Kepegawaian Periode Tahun 2022-2023



3. Persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu.

- Indikator Kinerja persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai yang mendapat hak kenaikan pangkat pada tahun 2022 dengan pegawai yang mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu.
- Pengusulan kenaikan pangkat (KP) pegawai dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan. Kenaikan Pangkat pegawai terjadi pada 2 (dua) periode terhitung pada bulan April dan Oktober. Apabila TMT kenaikan pangkat jatuh pada bulan April, maka pengusulan KP-nya dilakukan pada bulan Oktober tahun sebelumnya dan begitu pula apabila pegawai yang KP-nya jatuh pada bulan Oktober, diusulkan pada bulan April tahun yang sama.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Kenaikan Pangkat tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang naik Pangkat}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, jumlah pegawai yang naik pangkat sebanyak 7 orang pegawai dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.36. Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	M. Hasanuddin Hefni,SH,MH.	Hakim	TMT 1 April 2023
2.	Triu Artanti, SH.	Hakim	TMT 1 April 2023
3.	Ivan Daniel Tentua, SE.	Kasubag Umum Keuangan	TMT 1 April 2023
4.	Anggara Mahendra NP.SH, MH.	Panitera Pengganti	TMT 1 April 2023
5.	Rosi Denovi Puspitasari, SE.	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	TMT 1 April 2023
6.	Ari Efendi, SH.	Sekretaris	TMT 1 Oktober 2023

Capaian Kinerja pada indikator persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.37. Persentase Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1	Persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%

Dari 6 (enam) pegawai yang naik pangkat pada tahun 2023, semuanya telah mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu, jadi realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

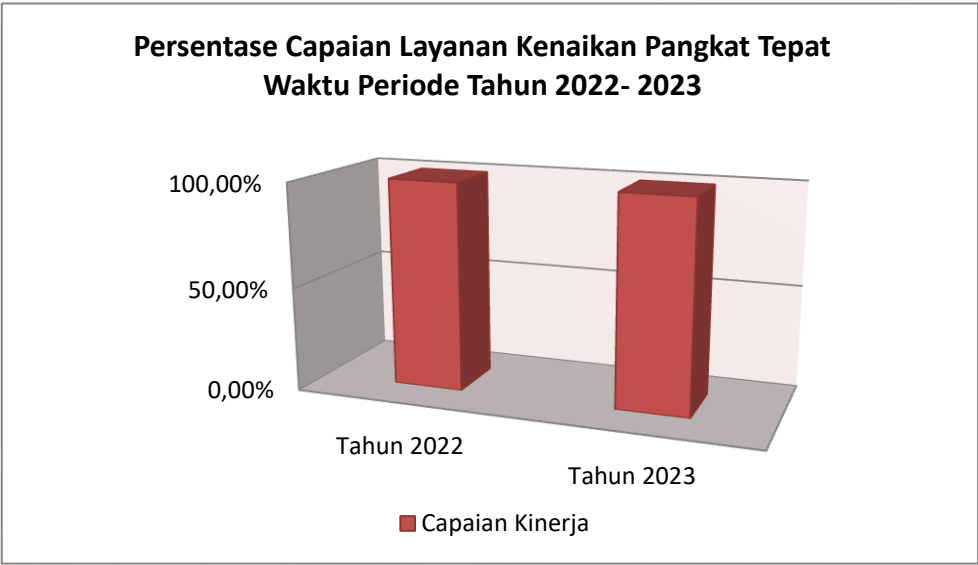
Persentase layanan kenaikan pangat tepat waktu ditargetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 %.

Perbandingan Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu tahun 2022 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah:

Tabel 3.38 Jumlah Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Naik Pangkat	Jumlah Layanan kenaikan pangkat Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2023	6	6	100%	100%	100%
2022	7	7	100%	100%	100%

Grafik 3.15. Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa semua kenaikan pangkat diproses secara tepat waktu oleh Sub Bagain Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Nganjuk melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan tidak ada keterlambatan dalam layanan kenaikan pangkat pegawai.

3. Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu.

- Indikator Kinerja persentase layanan pengusulan pensiun tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai pegawai yang pensiun pada tahun 2023 dengan pengawai yang mendapatkan layanan pengusulan pensiun tepat waktu.
- Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pengusulan Pensiun Tepat Waktu

Jumlah Pegawai yang Pensiun

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Daftar nama pegawai yang pensiun pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.39. Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1.	Basori	Pengadministrasi Pesuratan	1 Mei 2023
2.	Surahman	Panitera Muda Perdata	1 Juni 2023
3.	Denny Aprianata Legmiahell Manda, SH,MH.	Jurusita	5 Mei 2023

Capaian Kinerja pada indikator persentase pengusulan pensiun tepat waktu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.40. Persentase Capaian Pengusulan Pensiun Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1	Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Dari 3 (tiga) pegawai yang pensiun pada tahun 2023, semuanya telah diusulkan tepat waktu, jadi realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Persentase pengusulan pensiun tepat waktu ditargetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 %. Perbandingan Jumlah pegawai yang diusulkan pensiun tepat waktu tahun 2022 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah:

Tabel 3.41. Jumlah Capaian Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Usulan Pensiun Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2023	3	3	100%	100%	100%
2022	6	6	100%	100%	100%

Grafik. 3.16. Jumlah Capaian Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Periode Tahun 2022-2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa semua pegawai yang akan pensiun diusulkan secara tepat waktu dan tidak ada keterlambatan dalam pengusulan pensiun. Pengusulan pensiun pegawai dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum TMT pensiun pegawai yang bersangkutan.

Sasaran Startegis 6 : Mewujudkan Regulasi Dan Tata Kelola Yang Baik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Nilai LKJiP minimal BB	75 (BB)	75,5	100%
2.	Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	WBK	-	0%
3.	Nilai IPK	90%	98,65%	109,61%
4.	Nilai IKM	90%	95,76%	106,4%
5.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%
6.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%
7.	Persentase realisasi anggaran belanja	97%	97,30%	100,31%
8.	Persentase pelaporan LHKPN /LHK ASN tepat waktu	95%	100%	105,26%
9.	Persentase nilai kinerja anggaran	80%	95,35%	119,8%
10.	Persentase kedisiplinan masuk kerja	95%	98,36%	103,53%
11.	Pelanggaran disiplin	1%	0%	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				94,99%

Analisis Sasaran Strategis VI

1. Nilai LKJiP Minimal “ BB”

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yag telah ditetapkan, yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip -prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan

➤ Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan penilaian mandiri terhadap laporan SAKIP dan kemudian dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dilakukan evaluasi.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Hasil dari Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Surabaya, tahun 2022, Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan nilai 75,5 (BB).

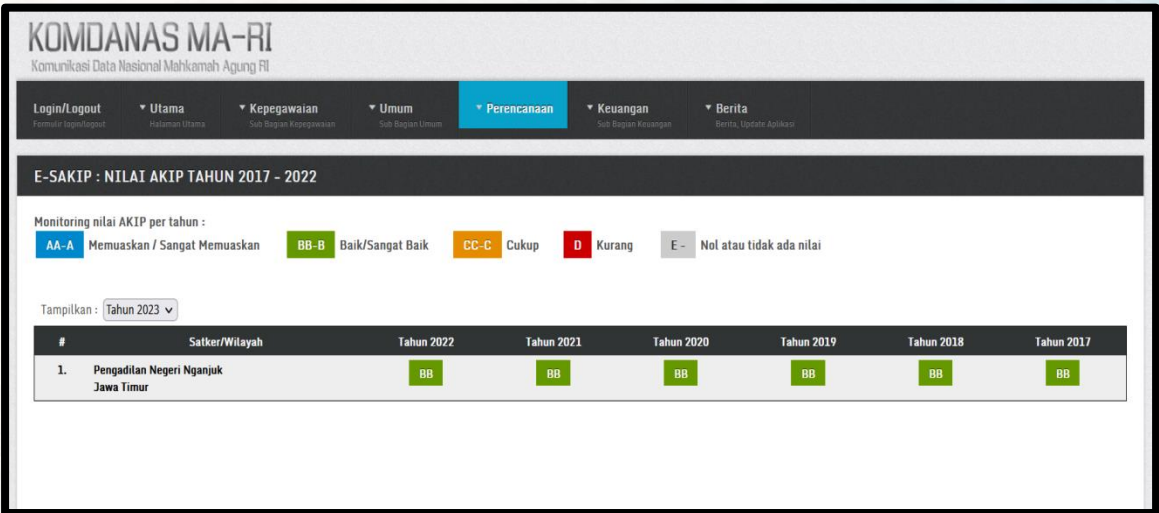
Capaian target kinerja Nilai LKJiP minimal BB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.43. Capaian Target Kinerja Nilai LKJiP Pengadilan Negeri Nganjuk

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2021	2022
1	Nilai LKJiP miniman “BB”	BB (75)	BB (75,5)	103,2%	100%

Target nilai LKJIP Pengadilan Negeri Nganjuk adalah “BB” sedangkan realisasinya adalah “BB”, sehingga realisasi untuk indikator ini tercapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. maka pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 %.

Gambar 3.4. Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas

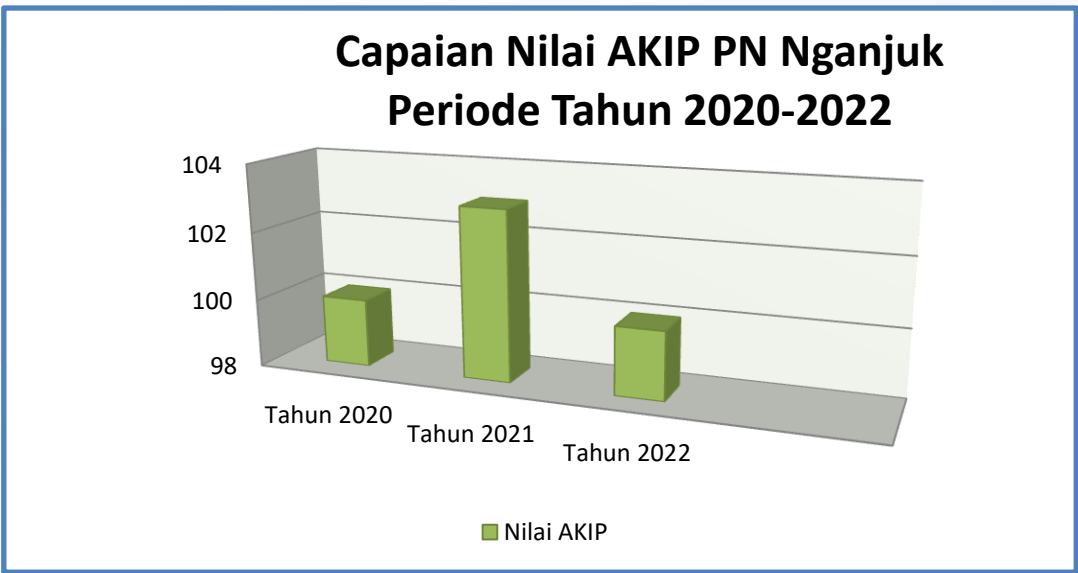


Berikut ini kami sajikan perbandingan capaian nilai LKJiP Pengadilan Nganjuk dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.44. Capaian Nilai AKIP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	75	75,5	100%
2021	75	77,40	103,2%
2020	75	75,35	100%

Grafik 3.16. Perbandingan Capaian Nilai AKIP Pengadilan Negeri Nganjuk Periode Tahun 2020-2022



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai AKIP Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2022 mengalami penurunan dimana pada tahun sebelumnya capaian nilai AKIP Pengadilan Negeri Nganjuk 103,2% dengan niali 77,40 sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 100% dengan nilai 75,5. Hal ini akan menjadi acuan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk selalu berusaha mengembangkan personil yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam pelatihan atau diklat akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh tingkat banding maupun Mahkamah Agung agar nilai akuntabilitas kinerja bisa meningkat. Meskipun demikian, pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk memperoleh Piagam Penghargaan Peringkat ke 3 Pencapaian Nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terbaik se wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya.

Gambar 3.5. Piagam Penghargaan Peringkat ke 3 Pencapaian Nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terbaik di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya.



2. Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

- Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.
- Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Nganjuk mentargetkan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) , namun tidak bias tercapai, sehingga realisasi dari indikator ini adalah 0.

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Predikat Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.45. Capaian Target Kinerja Predikat Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Pengadilan Negeri Nganjuk

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1	Predikat Pembangunan ZI menuju WBK / WBBM	WBK	-	0%	0%

Target pada indikator kinerja ini adalah pada tahun 2023, Pengadilan Negeri nganjuk dapat meraih WBK, namun realisasinya PN Nganjuk belum bisa meraih WBK, sehingga persentase capaian kinerja pada indikator ini adalah 0%.

3. Nilai IPK.

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi.
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membuat inovasi e- survey untuk mengukur Indeks persepsi anti korupsi dengan menggunakan aplikasi e- Survey Badilum dengan alamat website esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.
- Terdapat 10 Indikator untuk mengukur indeks persepsi anti korupsi yaitu:
 1. Manipulasi peraturan.
 2. Penyalahgunaan jabatan.
 3. Menjual Pengaruh.
 4. Transparansi biaya.
 5. Transaksi rahasia.
 6. Biaya Tambahan.
 7. Hadiah.
 8. Transparansi pembayaran.
 9. Percaloan.
 10. Perbuatan curang

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Berdasarkan hasil dari aplikasi e-survey Badilum, Nilai IPK Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.46. Hasil IPK Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi e- Survey Badilum

Jangka Waktu	Jumlah Responden	Indeks IPK
Triwulan I (Januari – Maret)	162 Responden	3,88 / 96,88%
Triwulan II (April – Juni)	178 Responden	3,99 / 99,86%
Triwulan III (Juli – September)	166 Responden	3,95 / 98,67%
Triwulan IV (Oktober – Desember)	169 Responden	3,97 / 99,20%
Nilai Rata- Rata		98, 65%

Capaian Kinerja Indikator Nilai IPK tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47. Capaian Kinerja Hasil IPK

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1	Nilai IPK	90%	98,65%	109,32%	109,61%

Target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja Nilai IPK adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 98,65%, jadi persentase capaian kinerja untuk indikator nilai IPK telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 109,61%.

Perbandingan Capaian Nilai IPK dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.48. Capain Nilai IPK Periode Tahun 2022-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	90%	98,65%	109,61%
2022	90%	98,39%	109,32%

Grafik 3.17. Capaian Nilai IPK Periode Tahun 2022-2023



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sapai dengan tahun 2023, nilai indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Negeri Nganjuk meningkat, hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perilaku anti korupsi pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk juga semakin tinggi dan Pengadilan Negeri Nganjuk masuk dalam Kategori Bersih dari korupsi.

4. Nilai IKM

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sekarang menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Ruang lingkup pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat adalah
 1. Persyaratan.
 2. Prosedur.
 3. Waktu Pelayanan.
 4. Biaya/Tarif.
 5. Produk Spesifikasi Pelayanan.
 6. Kompetensi Pelaksana.
 7. Perilaku Pelaksana.
 8. Sarana dan Prasarana.
 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.49. Hasil IKM Berdasarkan Aplikasi e- Survey Badilum Tahun 2023

No.	Peroide	Jumlah Responden	Hasil Survei
1.	Triwulan I (Januari- Maret)	152	93,53%
2.	Triwulan II (April - Juni)	161	97,57%
3.	Triwulan III (Juli - September)	169	95,51%
4.	Triwulan IV (Oktober- Desember)	167	96,49%
Nilai Rata- Rata			95,76%

Capaian Kinerja Indikator Nilai IKM tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50. Capaian Kinerja Hasil IKM

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1	Nilai IKM	90%	95,76%	108, 17%	106,4%

Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2023 adalah 90%, seangkan realisasinya adalah 95,76% sehingga Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 1064%.

Perbandingan capaian nilai Indeks Kepuasan masyarakat tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51. Capain Nilai IKM Periode Tahun 2022-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	90%	95,76%	106,4%
2022	90%	97,32%	108, 17%

Grafik 3.18. Capaian Nilai IKM Periode Tahun 2022-2023



Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2023 capaian nilai IKM menurun 1,77% dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 capaian nilai IKM sebesar 108,17% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 106,4 %. Meskipun demikian, secara keseluruhan nilai survey IKM di tahun 2023 Pengadilan Neegeri Nganjuk dalam katagori SANGAT BAIK, hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi

para pengguna peradilan serta berusaha melengkapi sarana dan prasarana demi menunjang kenyamanan masyarakat pengguna peradilan.

5. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

- Merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilum untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.
- Pengadilan Negeri Nganjuk pertama kali melaksanakan akreditasi penjaminan mutu pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 mendapatkan predikat A excellent dan setiap tahun terdapat penilaian kembali.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian Kinerja Indikator Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.52. Capaian Kinerja Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%	100%

Target yang ditetapkan untuk inidkator ini adalah Penagdilan Negeri Nganjuk adalah mendapatkan predikat A Excellent untuk penialaian APM. Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Nganjuk masih dapat mempertahankan predikat predikat A excellent, sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2023 untuk indikator ini adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian kinerja perdikat Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53. Capain Kinerja Predikat Akrediatsi Penjaminan Mutu Periode Tahun 2022-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	A	A	100%
2022	A	A	100%

Grafik 3.19. Capain Kinerja Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu Periode Tahun 2022-2023



6. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- Indikator kinerja ini mengukur perbandingan antara jumlah PNBP yang diterima dengan PNBP yang disetor ke kas Negara.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah PNBP yang disetor ke kas negara

Jumlah PNBP yang diterima

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.54. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2023, jumlah PNBP yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dari DIPA 01 adalah Rp. 5.497.704,- didapat dari sewa tanah gedung dan bangunan untuk kantin dan rumah dinas, sedangkan untuk DIPA 03 adalah Rp. 38.857.000,- didapat dari

pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya, pendapatan leges dan pengesahan dan pendaftaran surat dibawah tangan.

Dari jumlah PNBPN baik DIPA 01 dan 03 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, semua disetor ke kas Negara, jadi realisasi pada indikator ini adalah 100%.

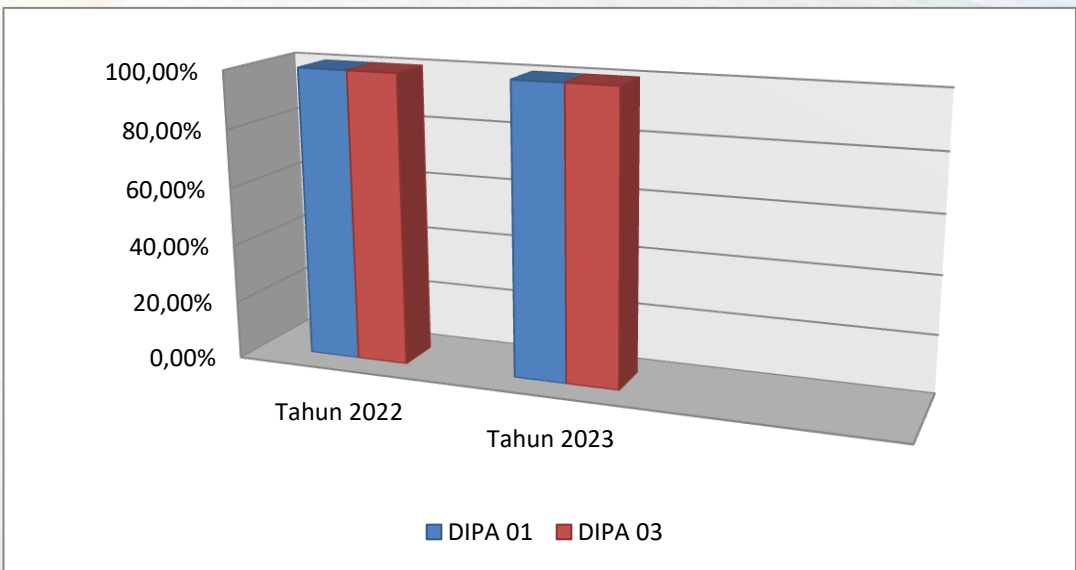
Target yang telah ditetapkan adalah 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pada untuk indikator ini adalah 100%.

Berikut adalah data penerimaan PNBPN Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2022-2023

**Tabel 3.55. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPN
Periode Tahun 2022 - 2023**

No.	Tahun	PNBPN Yang Diterima (Rp.)	PNBPN Yang Disetor (Rp.)	Target	Realisasi	Capaian
1.	2023					
	DIPA 01	5.497.704	5.497.704	100%	100%	100%
	DIPA 03	38.857.000	38.857.000	100%	100%	100%
2.	2022					
	DIPA 01	17.479.132	17.479.132	100%	100%	100%
	DIPA 03	50.690.500	50.690.500	100%	100%	100%

**Grafik 3.20. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPN
Periode Tahun 2022 - 2023**



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Pengadilan Negeri Nganjuk tertib dalam melaksanakan kewajiban untuk penyetoran PNBPN ke kas Negara, dimana PNBPN yang diterima sama dengan PNBPN yang disetorkan ke kas Negara.Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk tertib dalam penyetoran PNBPN diantaranya :

1. Menetapkan target PNBPN berdasarkan realisasi PNBPN tahun sebelumnya.
2. Melakukan penyetoran PNBPN secara tepat waktu.
3. Melakukan monitoring realisasi PNBPN secara berkala.

7. Persentase Realisasi Anggaran Belanja

- Indikator kinerja persentase realisasi anggaran belanja ini mengukur perbandingan antara anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dengan realisasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Jumlah anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56. Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2023

DIPA	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)
01	Program Dukungan Manajemen	620.3470.000	6.346.277.000	6.065.964.437
03	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	136.500.000	123.800.000	122.576.633

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.57. Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja

No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
					2022	2023
	Persentase realisasi anggaran belanja					
	a.	DIPA 01	97%	95,58%	101,97%	98,54%
	b.	DIPA 03	97%	99,01%	99,07%	102,07%
Rata- Rata			97%	97,30%	100,52%	100,31%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 97%, untuk DIPA 01 realisasi anggaran mencapai 95,58%, tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk DIPA 03 realisasi anggarannya sebesar 99,01 %.Namun secara keseluruhan, realisasi anggaran belanja untuk DIPA 01 dan 03 telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana target pada indikator ini sebesar 97% sedangkan rata- rata

realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 mencapai 97,30% dengan capaian kinerja sebesar 100,31%.

Perbandingan persentase capaian realisasi anggaran tahun 2022 – 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.58. Persentase Capaian Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2023

Tahun	Kode DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Capaian
2023	01	6.346.277.000	6.065.964.437	97%	95,58%	98,54%
	03	123.800.000	122.576.633	97%	99,01%	102,07%
Rata-Rata				97%	97,30%	100,31%
2022	01	6.335.156.000	6.266.202.956	97%	98.91%	101,97%
	03	142.806.000	137.235.000	97%	96,10%	99,07%
Rata-Rata				97%	97,56%	100,52%

Grafik 3.21. Persentase Capaian Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,21% dibandingkan dengan tahun sebeumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melaksanakan pengelolaan anggaran yang lebih baik agar anggaran yang telah diperoleh dapat terserap secara optimal. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Reviu DIPA secara periodik dan melakukan revisi DIPA jika terdapat perubahan kebijakan/program pada RKA-KL.

- Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
- Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA.
- Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pagu Minus.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

8. Persentase Pelaporan LHKPN /LHK ASN Tepat Waktu

- Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu ini mengukur perbandingan antara pegawai yang wajib lapor LHKPN dan LHK ASN dengan pegawai yang lapor tepat waktu.
- Batas waktu pelaporan LHKPN/LHKASN adalah 31 Maret Tahun berikutnya.
- Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 2 tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) menyatakan bahwa yang sebelumnya ASN dibebankan melaporkan LHKASN maka ditahun 2023 ASN cukup melaporkan SPT Tahunan.
- Untuk wajib lapor LHKPN tetap melakukan pelaporan LHKPN.
- Data wajib Lapor LHKPN adalah Hakim, Pejabat Pengelola Keuangan, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pegawi yang lapor tepat waktu

x 100%

Jumlah Pegawai Yang Wajib Lapor LHKPN

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.59. Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Persentase pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu	95%	100%	105,26%	105,26%

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada indikator ini adalah sebesar 95%. Dari 20 Pegawai yang wajib lapor LHKPN, semuanya

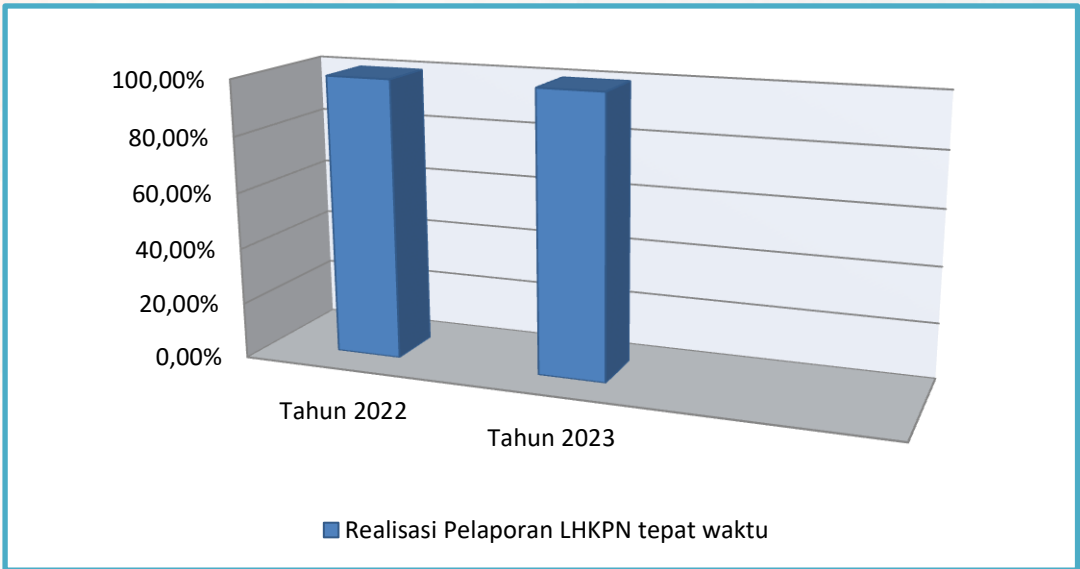
melaporkan tepat waktu, sehingga realisasinya adalah 100%, melebihi target yang ditetapkan. Jadi untuk capaian kinerja indikator persentase pelaporan LHKPN tepat waktu adalah sebesar 105,26%.

Perbandingan capaian kinerja persentase pegawai yang melaksanakan pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.60. Capaian Kinerja Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Jumlah Pelapor LHKPN	Target	Realisasi	Capaian
1.	2023	20	95%	100%	105,26%
2.	2022	22	95%	100%	105,26%

Grafik 3.22. Capaian Kinerja Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2022-2023



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi pelaporan LHKPN adalah 100%, jadi tidak ada yang terlambat dalam pelaporan harta kekayaan pegawai kepada KPK, hal ini karena kesadaran pegawai akan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang harus dilakukan setiap tahun sangat tinggi.

9. Persentase Nilai Kinerja Anggaran

- Indikator kinerja persentase nilai kinerja anggaran ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- Pengukuran nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada nilai IKPA yang diperoleh satuan kerja.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator kinerja anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.61. Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran

No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
					2022	2023
	Persentase realisasi kinerja anggaran					
	a.	DIPA 01	80	98,04	120%	122,5%
	b.	DIPA 03	80	92,68	115,44%	115,85%
Rata- Rata			80	95,36	117,72%	119,18%

Target untuk indikator ini adalah 80 sedangkan realisinya adalah 95,36, sehingga capaian kinerja indikator persentase realisasi kinerja anggaran tahun 2023 adalah 119,18%.

Nilai IKPA dipengaruhi oleh penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP deviasi halaman III Dipa untuk revisi tahun berjalan dan capaian output.

Perbandingan capaian persentase nilai kinerja anggaran tahun 2022- 2023 pada Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.62. Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 - 2023

Tahun	Kode DIPA	Target	Realisasi	Capaian
2023	01	80	98,04	122,5%
	03	80	92,68	115,85%
Rata-Rata		80	95,36	119,18%
2022	01	80	96,01	120%
	03	80	92,36	115,44%
Rata- Rata		80	94,16	117,72%

Grafik 3. 23 Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 - 2023



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja persentase nilai kinerja anggaran pada tahun 2022 mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, dimana pada tahun 2022 nilai kinerja anggaran sebesar 94,16 dengan capaian kinerja sebesar 117,72% sedangkan pada tahun 2023 nilai kinerja anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk mencapai 95,36 dengan capaian kinerja sebesar 119,18%.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat meningkatkan nilai IKPA satuan kerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revidi atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran apabila diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada satuan kerja .
2. Merevidi rencana kegiatan secara periodik serta menyusun rencana penarikan dana dari masing- masing jenis belanja.
3. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal.
4. Untuk belanja kontraktual dilakkan percepatan lelang dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
5. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai.
6. Melakukan pengelolaan UP dan TUP secara efektif dan efisien.
7. Memantau progress penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam pemroses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
8. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komperhensif, akurat dan disiplin dan melakukan pelaporan sebelum batas akhir periode pelaporan.

10. Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja

- Indikator kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja ini mengukur tingkat kedisiplinan pegawai untuk mematuhi jadwal kerja yang telah ditetapkan.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah kehadiran

Jumlah hari kerja

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Berikut rekapitulasi kehadiran pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan data pada Komdanas.

Tabel 3.63. Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Nganjuk Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Hari Efektif	Jumlah Ketidakhadiran
1.	Januari	21	0
2.	Februari	20	1
3.	Maret	21	0
4.	April	19	0
5.	Mei	21	0
6.	Juni	17	1
7.	Juli	20	0
8.	Agustus	22	1
9.	September	20	0
10.	Oktober	22	1
11.	November	22	0
12.	Desember	19	0
Total		244	4

Capain kinerja Indikator Persentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.64. Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Persentase kediplinan masuk kerja	95%	98,36%	100,55%	103,53%

Jumlah hari kerja selama tahun 2023 dalah 244 hari, sedangkan jumlah ketidakhadiran pegawai adalah 4 hari. Perhitungan pada indikator ini sebagai berikut:

Persentase kehadiran = (Jumlah hari tidak hadir : Jumlah hari kerja) x 100.

= (4 hari : 244 hari) x 100.

= 1,64 %

Persentase kehadiran = 100 % – 1,64 % = 98,36 %.

Target dari indikator persentase kedisiplinan masuk kerja adalah 95%, sedangkan realisasinya adalah 98,36%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 103,53%.

Perbandingan capaian persentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2022- 2023 pada Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.65. Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2022 – 2023

Tahun	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Kehadiran	Target	Realisasi	Capaian
2023	244	240	95%	98,36%	103,53%
2022	246	235	95%	95,53%	100,55%

Grafik 3. 24 Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,98% dibandingkan dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja persentase tingkat kedisiplinan masuk kerja pegawai sebesar 100,55% sedangkan pada tahun 2023 naik menjadi 103,53%. Tingkat kedisiplinan aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk di dukung dengan adanya remunerasi yang diberikan setiap bulannya untuk memotivasi pegawai agar bekerja secara efektif serta meningkatkan kinerja guna mewujudkan visi misi organisasi.

11. Pelanggaran Disiplin

- Indikator kinerja pelanggaran disiplin mengukur tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pada Pengadilan Negeri Nganjuk.
- Perhitungan pada indikator pelanggaran disiplin adalah semakin kecil persentase pelanggaran disiplin maka semakin baik capaian kinerja untuk indikator ini.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Berikut adalah rekapitulasi data hukuman disiplin Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2023:

Tabel 3.66. Data Hukuman Disiplin Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2023

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah Pelanggar
1.	Ringan	
	a. Teguran lisan	0
	b. Teguran tertulis	0
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	0
Jumlah pelanggaran disiplin ringan		0
2.	Sedang	
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	0
	b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	0
	c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun	0
Jumlah pelanggaran disiplin sedang		0
3.	Berat	
	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	0
	b. Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	0
	c. Pembebasan dari Jabatan	0
	d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	0
	e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	0
Jumlah pelanggaran disiplin berat		0

Capaian Kinerja Indikator Pelanggaran Disiplin tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.67. Capaian Kinerja Pelanggaran Disiplin Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Pelanggaran disiplin	1%	0%	100%	100%

Tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran disiplin baik ringan, sedang ataupun berat yang dilakukan oleh pegawai Pengadilan Nganjuk, jadi untuk capaian target pada indikator ini adalah sebesar 100%.

Perbandingan capaian persentase pelanggaran disiplin tahun 2022- 2023 pada Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.68. Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Tahun 2022 – 2023

Tahun	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	1%	0%	100%
2022	0	1%	0%	100%

Grafik 3. 25 Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase pelanggaran disiplin di Pengadilan Negeri Nganjuk mencapai 100% dalam artian, tidak terdapat pelanggaran disiplin baik ringan, sedang ataupun berat yang dilakukan oleh pegawai Pengadilan Nganjuk sepanjang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk diantaranya:

1. Pimpinan melakukan pembinaan secara berkala kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk terkait kedisiplinan yang dilaksanakan melalui rapat berjenjang.
2. Melakukan penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan setiap tahun.
3. Dalam apel maupun briefing selalu mengingatkan pegawai agar selalu menjunjung tinggi kode etik dan integritas serta penerapan core value berakhlak dalam lingkungan kerja.

Sasaran Startegis 7 : Mewujudkan Pelayanan Kesekretaraian Yang Baik Dan Prima

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.69. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah Aplikasi yang telah diselesaikan	1 aplikasi	1 Aplikasi	100%
2.	Jumlah kapasitas banwith yang memadai	100 Mbps	100 Mbps	100%
3.	Persentase distribusi surat	100%	100%	100%
4.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%
5.	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	100%	111,11%
6.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5	3	60%
7.	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media	30 Berita	180 berita	600%
8.	Jumlah layanan pengadilan	7 layanan	7 layanan	100%
9.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	250 orang	649 orang	259,6%
10.	Jumlah layanan bantuan hukum	200 orang	240 orang	120%
11.	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%
12.	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m ²	3.000 m ²	100%
13.	Jumlah pemelihraaan rumah dinas	5 unit	5 unit	100%
14.	Jumlah pemeiharaan peralatan/mesin kantor	114 unit	114 unit	100%
15.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan ata usaha dan rumah tangga	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				137,45%

Analisis Sasaran Strategis VII

4. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan

- Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk membuat beberapa inovasi. Inovasi-inovasi ini dapat langsung dirasakan langsung oleh masyarakat maupun internal Pengadilan Negeri Nganjuk.
- Indikator ini mengukur berapa jumlah aplikasi yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri Nganjuk selama tahun 2023 dan manfaat yang didapatkan dari aplikasi tersebut.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

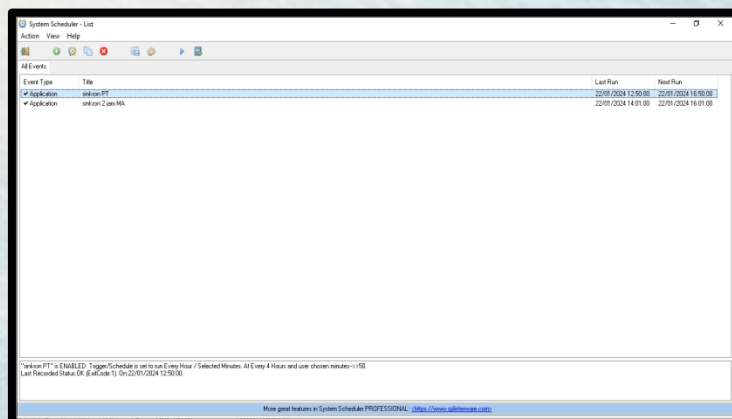
Tabel 3.70. Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	100%

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada indikator jumlah aplikasi yang diselesaikan adalah 1 aplikasi, sedangkan realisasinya adalah 1 aplikasi, jadi untuk capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebesar 100%.

Dalam kurun waktu tahun 2023, terdapat 1 aplikasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Nganjuk yaitu aplikasi sinkronisasi SIPP otomatis. Sinkronisasi otomatis ini berfungsi untuk menyinkronkan data dari SIPP Pengadilan Negeri Nganjuk ke server Mahkamah Agung maupun server Pengadilan Tinggi Surabaya, Sinkron otomatis ini berjalan setiap 2 (dua) jam sekali. Penggunaan aplikasi ini dibuat agar mempermudah sinronisasi data SIPP ke server pusat yang dulunya dilakukan secara manual 4 sampai 5 kali dalam sehari.

Gambar 3.6. Aplikais Sinkronisasi SIPP Otomatis

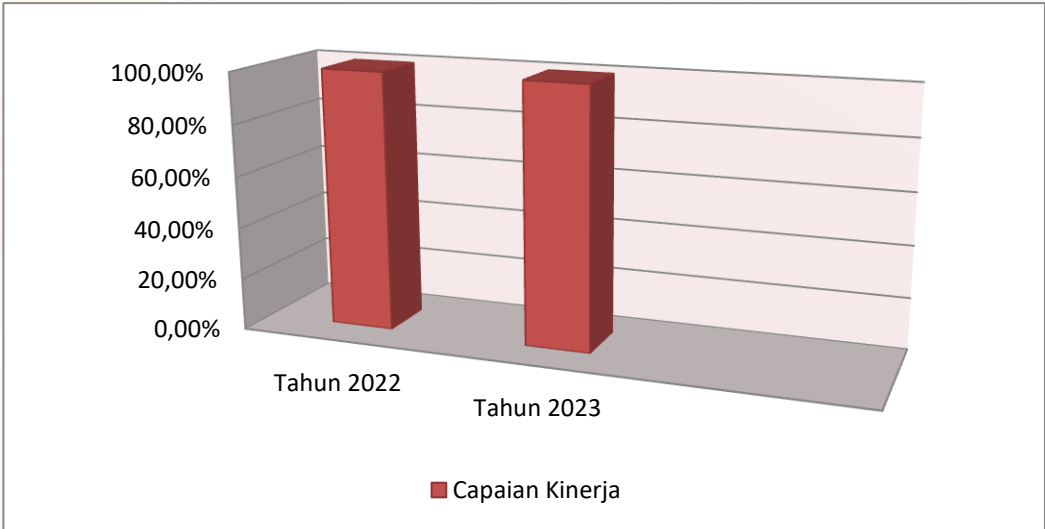


Perbandingan capaian kinerja jumlah aplikasi yang telah diselesaikan satuan kerja tahun 2022- 2023 pada Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.71. Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Diselesaikan Satuan Kerja Tahun 2022 – 2023

Tahun	Jumlah Aplikasi Yang diselesaikan satuan kerja	Target	Realisasi	Capaian
2023	1 Aplikasi	1	1	100%
2022	1 Aplikasi	1	1	100%

Grafik 3. 26 Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Diselesaikan Satuan Kerja Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah aplikasi yang diselesaikan satuan kerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dimana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk cukup produktif dalam pembuatan aplikasi yang bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan. Namun inovasi yang buat dalam setiap tahun terbatas jumlahnya, hal ini disebabkan keterbatasan sumber dana untuk pembuatan inovasi.

2. Jumlah kapasitas banwith yang memadai

- Indikator ini mengukur ketersediaan banwith yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menunjang kinerja pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.
- Bandwidth jika dijabarkan secara lengkap adalah jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antara server dan client yang ditentukan dalam hitungan bit per second (bps). Dapat dikatakan pula, bandwidth adalah maksimal besar transfer yang bisa dilakukan dalam proses pertukaran data dalam satu waktu tertentu.

- Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 724/SEK/OT.01.1/5/2019, tentang petunjuk pelaksanaan SP-SABA disebutkan bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan e- court berupa peningkatan banwith yang regular menggunakan jasa telekomunikasi bersifat dedicated dengan ketentuan untuk Pengadilan Tingkat Banding serendah rendahnya 50 Mbps dan Pengadilan Tingkat pertama serendah-rendahnya 50 Mbps.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

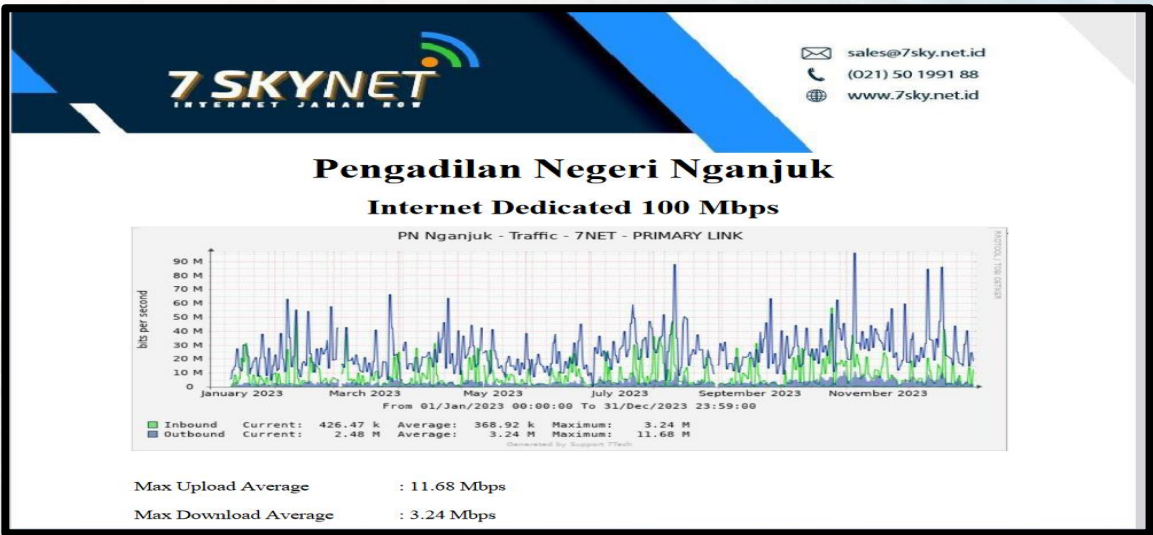
Capaian kinerja indikator jumlah kapasita banwith yang memadai adalah sebagai berikut:

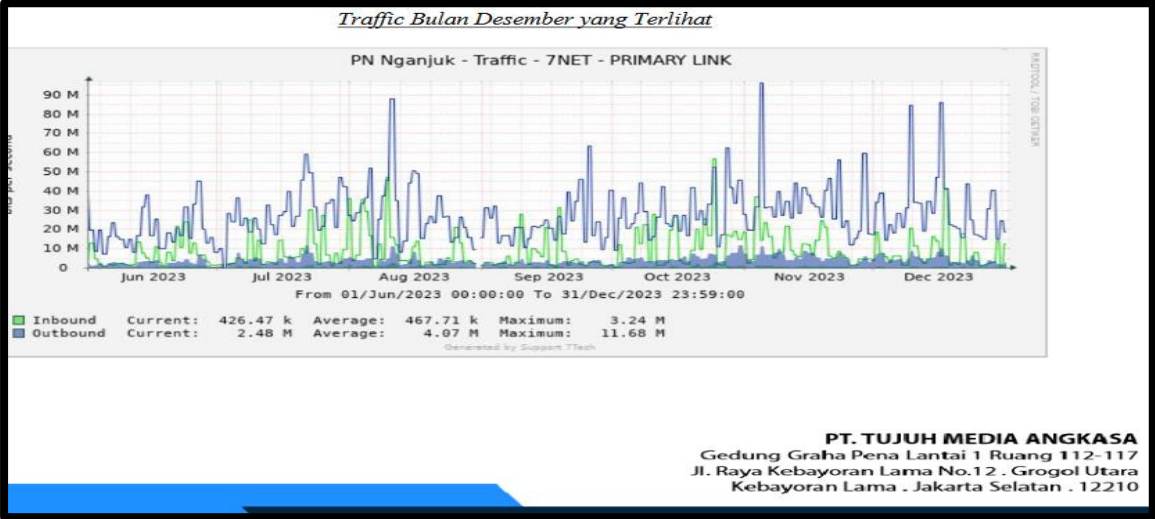
Tabel 3.72. Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai	100 Mbps	100 Mbps	100%	100%

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada indikator jumlah kapasitas banwith yang memadai adalah 100 Mbps, sedangkan realisasinya adalah 100 Mbps , jadi untuk capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebesar 100%, sesuai target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.7. Grafik Laporan Ketersediaan Banwith Internet Tahun 2023





Gambar diatas merupakan grafik laporan pemakaian internet pada Pengadilan Negeri Nganjuk serta ketersediaan banwith internet selama tahun 2023. Dalam grafik tersebut digambarkan rata- rata tingkat kebutuhan internet maksimal pada angka 40-60 Mbps, sedangkan ketersediaan banwith dari profider adalah 100 Mbps, sehingga kapasitas banwith yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk sudah tercukupi.

Perbandingan capaian kinerja jumlah kapasitas banwith yang memadai tahun 2022-2023 pada Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.73. Capaian Kinerja Jumlah Jumlah Kapasita Banwith Tahun 2022 – 2023

Tahun	Kapasitas Banwith yang tersedia	Target	Realisasi	Capaian
2023	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100%
2022	50 Mbps	50 Mbps	50 Mbps	100%

Grafik 3.27. Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah kapasitas banwith dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dimana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik. Untuk tahun 2023, Pengadilan Negeri Nganjuk meningkatkan kapasita banwith yang semula dari 50 Mbps menjadi 100 Mbps untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memastikan bahwa jumlah kapasitas banwith yang ada memdai yaitu dengan cara melakukan monitoring terhadap ketersediaan banwith dan melakukan koordinasi dengan pihak penyedia apabila terjadi kendala atau penurunan kapasitas banwith.

2. Persentase Distribusi Surat.

- Indikator kinerja persentase distribusi surat mengukur perbandingan antara surat masuk dengan surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian.

Dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian}}{\text{Jumlah surat masuk}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.74. Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Persentase distribusi surat	100%	100%	100%	100%

Dalam kurun waktu tahun 2023, terdapat 868 surat masuk dan semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian.

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada indikator persentase distribusi surat adalah 100%, sedangkan realisasinya adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebesar 100%.

Perbandingan pengukuran capaian kinerja persentase pendistribusian surat tahun 2022-2023 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.75. Capaian Kinerja Jumlah Pendistribusian Surat Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Jumlah Surat masuk	Jumlah Surat Yang didistribusikan	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	868 surat	868 surat	100%	100%	100%
2.	2022	1778 surat	1778 surat	100%	100%	100%

Grafik 3.28. Capaian Kinerja Jumlah Pendistribusian Surat Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 dengan 2023 pada indikator jumlah pendistribusian surat ini sama yaitu 100%. Hal- hal yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memperlancar pensitribusian surat masuk adalah penggunaan aplikasi PTSP + dari Dirjen Badilum untuk pelayanan pesuratan dan untuk mempercepat pendistribusian surat masing- masing bagian, surat masuk di share pada wa grub sehingga surat masuk telah diketahui oleh masing – masing sambil menunggu disposisi berjalan.

3. Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu.

- Indikator kinerja persentase tindak lanjut surat tepat waktu mengukur perbandingan antara surat yang telah ditindak lanjuti tepat waktu dengan surat masuk.
- Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah jumlah surat yang ditindaklanjuti masing-masing bagian sesuai dengan disposisi pimpinan.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah surat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu

Jumlah surat masuk

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.76. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%	111,11%

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 100%, melebihi target yang telah ditetapkan, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebesar 111,11%.

Perbandingan pengukuran capaian kinerja persentase tindak lanjut surat tepat waktu tahun 2022-2023 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.77. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Jumlah Surat masuk	Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	868 surat	868 surat	90%	111,11%	111,11%
2.	2022	1778 surat	1778 surat	90%	111,11%	111,11%

Grafik 3.29. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 dengan 2023 pada indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu ini sama yaitu 111,11%. Dalam kurun waktu tahun 2023, terdapat 868 surat masuk dan semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian untuk ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai disposisi.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mempercepat tindak lanjut surat adalah surat masuk di share pada wa grub sehingga penanganan tindak lanjut surat pada masing- masing bagian segera dapat dilaksanakana sambil menunggu disposisi berjalan.

4. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat.

- Indikator ini mengukur kemudahan dan kecepatan pencarian arsip surat yang telah masuk maupun surat keluar pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu

Jumlah surat

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.78. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu	90%	100%	111,11%	111,11%

Target untuk indikator ini adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase arsip surat yang dapat ditemukan tepat waktu adalah sebesar 111,11%.

Perbandingan pengukuran capaian kinerja persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan cepat dan mudah tahun 2022-2023 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.79. Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang dapat Ditemukan Dengan Cepat Dan Mudah Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Jumlah Surat	Jumlah Surat dapat ditemukan dengan cepat dan mudah	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	1655	1655	90%	111,11%	111,11%
2.	2022	3544	3544	90%	111,11%	111,11%

Grafik 3.30. Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang dapat Ditemukan Dengan Cepat Dan Mudah Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan cepat dan mudah pada tahun 2023 adalah 111,11% berbanding lurus dengan capaian di tahun 2022.

Pada tahun 2023, jumlah surat masuk yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk sebanyak 868 surat dan surat keluar sebanyak 787surat dan semua surat terintegrasi dalam aplikasi PTSP +.

Selain itu, setiap bagian mempunyai buku registersurat masuk dan keluar untuk mempermudah dalam pencarian surat yang didisposisikan pada setiap bagian.

5. Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait.

- Indikator ini mengukur jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan instansi terkait di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk khususnya.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 3.80. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah Kerjasama antar instansi terkait	5	3	120%	60%

Target yang ingin dicapai pada indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah 3, sedangkan realisasinya sepanjang tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk menjalin kerjasama dengan 3 instansi terkait yaitu:

- 1. Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk penerapan keberlanjutan aplikasi e- Berpadu.
- 2. Kepolisian Resor Nganjuk untuk penerapan keberlanjutan aplikasi e- Berpadu.
- 3. Lembaga Pemasyarakatan Nganjuk untuk keberlanjutan penerapan aplikasi e- Berpadu.

Sehingga capain kinerja pada indikator ini adalah 60 %.

Perbandingan pengukuran capaian kinerja jumlah kerjasama antar instansi terkait tahun 2022-2023 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.81. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	5 Instansi	3 instansi	60%
2.	2022	5 Instansi	6 Instansi	120%

Grafik 3.31. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antara Instansi Terkait Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait pada tahun 2023 menurun sebanyak 60% dibandingkan dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Nganjuk melaksanakan MOU dengan 3 instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi e- Berpadu, sedangkan pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan 6 instansi termasuk lembaga juga dihitung didalamnya seperti Posbakum dan penyedia jasa internet, namun untuk tahun 2023 ini kerjasama dengan Posbakum dan penyedia jasa internet tidak di perhitungkan meskipun tetap terdapat kerjasama untuk tahun ini dengan pertimbangan kedua lembaga tersebut bukan sebuah instansi pemerintah.

6. Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media.

- Indikator ini mengukur berapa banyak berita yang tentang Pengadilan Negeri Nganjuk yang dimuat di media khususnya Website dan media sosial Pengadilan Negeri Nganjuk.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator jumlah berita tentang satuan kerja di dimuat dimedia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.82. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media	30 berita	180 berita	441,66%	600%

Target pada indikator ini adalah 30 berita, sedangkan realisasinya, sepanjang tahun 2023 berita yang dimuat di media khususnya website Pengadilan Negeri Nganjuk sebanyak 180 berita, sehingga capaian target pada indikator jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media adalah 600%.

Perbandingan pengukuran capaian kinerja jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media tahun 2022-2023 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.83. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat di Media Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	30 berita	180 berita	600%
2.	2022	24 berita	106 berita	441,66%

Grafik 3.32. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat di Media Tahun 2022 – 2023



Dari data yang ditampilkan diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja pada indikator ini sebesar 441,66 % sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 600% Selain media sosail lainnya, Website Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan media paling efektif untuk mempublikasikan kinerja maupun program kerja serta kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat, selain itu website juga dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang layanan yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk seperti layanan pubik, layanan hukum, serta profil pengadilan.

7. Jumlah Layanan Pengadilan.

- Indikator Jumlah layanan Pengadilan menjabarkan jumlah layanan pengadilan yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.84. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah Layanan Pengadilan	7 layanan	7 layanan	100%	100%

Target untuk indikator jumlah layanan di Pengadilan adalah 7 Layanan, sedangkan realisasinya adalah 7 Layanan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Perbandingan pengukuran capaian kinerja jumlah layanan pengadilan tahun 2022-2023 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.85. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	7 Layanan	7 Layanan	100%
2.	2022	7 Layanan	7 Layanan	100%

Grafik 3.33. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2022 – 2023



Layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Layanan PTSP Pidana.
2. Layanan PTSP Perdata.
3. Layanan PTSP Hukum.
4. Layanan PTSP Umum
5. Layanan e-Court.
6. Layanan e-Berpadu.
7. Layanan Informasi Persidangan.

Semua layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk berada pada Ruang PTSP yang bertempat di lobi depan kantor Pengadilan Negeri Nganjuk yang tentunya mudah diakses oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan. Pada ruang PTSP disediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pengunjung juga disediakan tempat khusus untuk para penyandang disabilitas agar dapat memperoleh layanan prioritas. Selain ruang tunggu yang nyaman, juga terdapat mesin antrian PTSP untuk mempermudah pengguna pengadilan dalam memperoleh haknya untuk dilayani serta memberikan kemudahan petugas pelayanan dalam melayani masyarakat pengguna peradilan sehingga tercapai *service excellent*.

8. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan.

- Indikator jumlah pengguna layanan pengadilan mengukur berapa banyak masyarakat yang menggunakan layanan peradilan pada periode tahun 2023.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator jumlah pengguna layanan pengadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.86. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan	250 orang	649 orang	164,4%	259,6%

Target untuk indikator jumlah pengguna layanan Pengadilan adalah 250 orang, sedangkan realisasinya adalah 649 orang , melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 259, 6%.

Jumlah pengguna layanan di pengadilan dilihat dari jumlah masyarakat pengguna peradilan yang telah mengisi suryey kepuasan masyarakat yang ada di desk info PTSP. Perbandingan capaian kinerja jumlah pengguna layanan pengadilan pada tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.87. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	250 orang	649 orang	259,6%
2.	2022	250 orang	411 orang	164,4%

Grafik 3.34. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2022 – 2023



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah pengguna layanan pengadilan meningkat dan menunjukkan angka yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Nganjuk harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kenyamanan para pengguna pengadilan guna menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.

9. Jumlah Layanan Bantuan Hukum.

- Indikator jumlah layanan bantuan hukum mengukur berapa jumlah layanan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.88. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah layanan bantuan hukum	200 orang	240 orang	120 %	120%

Target untuk indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah 200 orang, sedangkan realisasinya adalah 240 orang , melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 120%.

Perbandingan Capaian Kinerja jumlah layanan bantuan hukum dari tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.89. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	200 orang	240 orang	120%
2.	2022	200 orang	240 orang	120%

Grafik 3.35. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022 – 2023



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu cukup banyak.

Pengadilan Negeri Nganjuk melaksanakan kerja sama dengan penyedia jasa layanan bantuan hukum melalui perjanjian kerjasama dengan lembaga bantuan hukum POSBAKUMADIN untuk layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan atau penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum dan memberikan tempat yang representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan advise hukum dan pendampingan terdakwa selama persidangan terhadap orang kurang mampu.

10. Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian.

- Indikator kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian mengukur perbandingan antara jumlah pengusulan kepegawian seperti usulan jabatan dan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) dengan penyelesaian usulan Kepegawaian.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian

Jumlah Usulan Kepegawaian

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.90. Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100 %	100%

Target untuk indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah 100% orang, sedangkan realisasinya adalah 100% , sesuai target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Perbandingan realisasi persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.91. Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian

No.	Tahun	Jumlah Usulan Kepegawaian (Usulan Jabatan dan KGB)	Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	2023	17	17	100%	100%	100%
2.	2022	20	20	100%	100%	100%

Grafik 3.36. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2022– 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, capaian kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah 100%, artinya setiap usulan kepegawian yang diajukan semua diselesaikan dengan baik. Pada tahun 2023 tidak terdapat usulan jabatan, untuk usulan KGB sejumlah 17 orang dan semua usulan telah diselesaikan dan ditindaklanjuti. Pengusulan kepegawian baik usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan jabatan ataupun kenaikan gaji berkala adalah hak setiap pegawai yang harus dipenuhi untuk menunjang kinerja pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pengguna pengadilan.

11. Jumlah Pemeliharaan Gedung.

- Indikator jumlah pemeliharaan gedung mengukur jumlah luasan gedung Pengadilan dan anggaran yang didapat oleh satuan kerja.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.92. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m ²	3.000 m ²	100 %	100%

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah 3.000 m², dihitung dari luasan gedung dan bangunan yang dilakukan pemeliharaan sesuai dengan RKA-KL tahun 2023, sedangkan realisasinya adalah 3.000 m² sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Perbandingan capaian kinerja jumlah pemeliharaan gedung pada tahun 2022- 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 3.93. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2022 – 2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	3.000 m2	3.000 m2	100%
2.	2022	2.259 m2	2.259 m2	100%

Grafik 3.37. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator ini dari tahun 2022 sampai dengan 2023 mencapai 100%. Volume kegiatan untuk belanja gedung dan bangunan pada tahun 2023 adalah 3.000 m² terdiri dari :

- 1. Gedung kantor 2.000 m²
- 2. Halaman gedung 1.000 m²

Untuk tahun 2022 luasan gedung dan halaman kantor yang tercatat pada RKA-KL seluas 2.259 m2 tidak sesuai dengan yang tertera pada KIB gedung kantor pengadilan, maka untuk tahun 2023 disesuaikan dengan KIB gedung dan halaman kantor yang sebenarnya.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan dengan pagu awal sebesar Rp. 182.734.000, oleh karena terdapat perubahan kebutuhan satuan kerja, maka diadakan revisi anggaran sehingga anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi Rp. 189.233.000,-

Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan bangunan yang belum sesuai dengan prototype. Pengajuan usulan pembangunan gedung kantor sesuai prototype sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk namun belum mendapat realisasi dari pusat dikarenakan ada target prioritas Mahkamah Agung untuk pembangunan gedung pengadilan yang baru di bentuk.

12. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas.

- Indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas menghitung jumlah rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan dengan anggaran yang didapatkan satuan kerja.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.94. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah pemeliharaan rumah Dinas	5 unit	3 unit	60%	60%

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 5 unit sesuai dengan volume yang ada di RKA-KL tahun 2023, sedangkan realisasinya adalah 3 unit , sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 60 %.

Perbandingan capaian kinerja jumlah jumlah pemeliharaan rumah dinas pada tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 3.95. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2022 – 2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	5 unit	3 unit	60%
2.	2022	5 unit	3 unit	60%

Grafik 3.38. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator ini dari tahun 2022 samapi dengan tahun 2023 masih sama yaitu 60%. Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki rumah dinas sebanyak 6 rumah dinas terdiri dari 3 (tiga) rumah dinas Hakim, 1 (satu) rumah dinas Panitera, 1 (satu) rumah dinas Ketua dan 1 (satu) rumah dinas Wakil Ketua. Rumah dinas yang bisa ditempati yaitu rumah dinas Ketua, rumah dinas Wakil Ketua dan rumah dinas Panitera, sedangkan 3 rumah dinas yang lain dalam keadaan rusak berat namun tetap dilakukan pemeliharaan untuk menjaga kebersihan dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Untuk pemeliharaan rumah dinas pada anggaran rkakl 2023 sebesar Rp.49.000.000.

Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengupayakan pengajuan usulan pengadaan pembangunan rumah dinas dan masih dalam tahap pengajuan ke dinas PUPR untuk analisa tingkat kerusakan bangunan dan kemudian diajukan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

13. Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin Kantor.

Indikator jumlah pemeliharaan peralatan mesin/kantor menghitung jumlah pemeliharaan peralatan mesin kantor dan anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan peralatan mesin kantor satuan kerja.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.96. Capaian Kinerja Jumah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor	114 unit	114 unit	100 %	100%

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah 114 unit , sedangkan realisasinya adalah 114 unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%

Perbandingan capaian kinerja jumlah jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor pada tahun 2022- 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 3.97. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2022 – 2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	114 unit	114 unit	100%
2.	2022	103 unit	103 unit	100%

Grafik 3.39. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin Kantor Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat capaian kinerja pada indikator jumlah pemeliharaan peralatan/ mesin pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 100%, artinya semua peralatan /mesin kantor telah mendapatkan pemeliharaan dengan dana yang terdapat pada DIPA satuan kerja.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin dengan pagu awal sebesar Rp. 110.850.000, oleh karena terdapat perubahan kebutuhan satuan kerja, maka diadakan revisi anggaran dan pada akhir trimester 3 Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan untuk pemeliharaan Roda 4 sebesar Rp. 25.000.000 sehingga anggaran untuk pemeliharaan peralatan / mesin menjadi Rp. 149.351.000,-.

14. Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga.

➤ Indikator Layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga mengukur jumlah layanan yang diberikan oleh kesekretariatan sebagai supporting

unit untuk keberlangsungan administrasi perkantoran di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.98. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 Layanan	12 Layanan	100%	100%

Target untuk indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga adalah 12 layanan , sedangkan realisasinya adalah 12 layanan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Perbandingan capaian kinerja jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga pada tahun 2022- 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 3.99. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2022 – 2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	12 Layanan	12 Layanan	100%
2.	2022	12 Layanan	12 Layanan	100%

Grafik 3.40. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga secara efektif dan efisien.

Sasaran Startegis 8 Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.100. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%	100%	111,11%
NILAI CAPAIAN KINERJA				111,11%

Analisis Sasaran Strategis VIII

1. Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

- Indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan menghitung jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk guna menunjang kinerja serta mendukung pelayanan terhadap masyarakat pengguna pengadilan.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Capaian kinerja indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung peayanan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.101. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
				2022	2023
1.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	90%	100%	111,11%	111,11%

Target untuk indikator Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung peayanan peradilan 90% , sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 111,11%.

Perbandingan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan pada tahun 2022- 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 3.102. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2023	90%	100%	111,11%
2.	2022	90%	100%	111,11%

Grafik 3.41. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2023



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator ini berbading lurus dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Tersedianya prasarana ruang tamu terbuka.
3. Tersedianya ruang kesehatan dan laktasi.
4. Tersedianya genset untuk kegiatan operasional kantor.
5. Tersedianya ruang tunggu sidang.
6. Tersedianya ruang mediasi.
7. Tersedianya fasilitas untuk Difabel.
8. Tersedianya jaringan listrik yang memadai untuk menunjang kegiatan perkantoran.
9. Tersedainya jaringan internet yang emadai sampai dengan kapasitas 100 Mbps.

Pengadilan Negeri Nganjuk selalu berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan peradilan. Anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan peradilan tersebut didapat dari Mahkamah Agung maupun hibah dari pihak ke tiga.

A.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu tantangan utama dalam sebuah instansi/ lembaga. Di mana instansi dituntut untuk dapat membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Singkatnya, efisiensi sumber daya manusia mengacu pada seberapa baik instansi menggunakan sumber daya manusia yang ada untuk bisa menjalankan roda organisasi dengan baik.

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan aparatur pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan Visi dan Misi pengadilan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama para pencari keadilan, ditentukan oleh unsur sumber daya manusia yang handal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Secara kuantitas, Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.103. Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	6
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panitera Muda	3
7.	Kepala Sub. Bagian	3
8.	Panitera Pengganti	8
9.	Jurusita	2
10.	Jurusita Penganti	6
11.	Analisis Perkara Peradilan	1
12.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2
13.	Pengadministrasi Register Perkara	1
14.	Pengadministrasi persuratan	1
15.	Pengelola perkara	1

16.	Arsiparis Pelaksana	1
Jumlah SDM		38 Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah 38 orang. Untuk jabatan struktural formasi telah terpenuhi, namun masih terdapat rangkap jabatan dikarenakan terdapat keterbatasan personil. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat mengelola SDM yang terbatas namun tetap dapat mmeberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

1. Jurusita /Jurusita Pengganti diperbantukan untuk mendukung tugas pengadministrasian di bagian kepaniteraan dan kesekretariatan.
2. Tenaga honorer sejumlah 9 orang diperbantukan pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan sebagai pengadministrasi umum.

Dari segi kualitas, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan manajemen sumber daya manusia yang baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manuasia di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk, telah dilakukan beberapa usaha diantaranya:

1. Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin.
3. Memberikan kesempatan untuk mengajukan ide atau gagasan demi kemajuan Pengadilan Negeri Nganjuk.
4. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
5. Memberikan hak pegawai seperyi hak kenaikan pangkat, kenailan gaji berkala, hak pengusulan pensiun tepat waktu da hak berkaitan dengan finansial.

A.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan.

Sebuah organisasi berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Penyusunan rencana sebagai arahan dalam meningkatkan efektifitas dan efsiensi kinerjanya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan . Strategi yang dilakukan salah satu contohnya adalah dibuatnya rencana jangka pendek atau yang biasa disebut sebagai anggaran. Anggaran dibuat cukup terinci guna memungkinkan disusunnya laporan keuangan bagi entitas tersebut untuk suatu periode di masa depan . Anggaran berperan penting dalam sebuah

organisasi. Perencanaan keuangan secara rinci disusun untuk membantu tercapainya program kegiatan organisasi.

Ada 3 (tiga) hal yang harus diingat dan dipahami ketika Pengadilan Negeri Nganjuk mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatannya yaitu:

1. Apa hasil dan manfaat yang bisa diperoleh masyarakat pengguna layanan (*output and outcome oriented*), hal ini untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai;
2. Tugas-fungsi yang melekat pada struktur organisasi (*money follow function*) hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran; dan
3. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*) (PMK 94/PMK.02/2017).

Hal-hal tersebut menjadi tuntutan bagaimana membelanjakan anggaran secara efektif dan efisien.

Berikut upaya Pengelola Anggaran pada Pengadilan Negeri Nganjuk dalam pelaksanaan efisiensi anggaran pada tahun 2023:

1. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk mengalami kelebihan anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah), dalam upaya efisiensi pembelanjaan anggaran, Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan revisi anggaran agar kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja lain yang mengalami kekurangan anggaran belanja pegawai.
2. Untuk DIPA 03, Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan revisi pagu anggaran sebesar Rp. 12.700.000 dalam upaya efisiensi pembelanjaan anggaran, kelebihan anggaran tersebut dikembalikan ke Direjen Badilum agar dapat di manfaatkan satuan kerja lain yang mengalami kekurangan anggaran khususnya DIPA 03.
3. Melakukan revisi POK baik DIPA 01 dan 03 agar pos –pos yang penyerapan anggarannya rendah agar dapat di manfaatkan pos lain yang anggarannya masih kurang agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik.

A.3 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pengadilan Negeri Nganjuk telah berupaya menerapkan berbagai program dan kegiatan antara lain:

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk agar menjadi professional

3. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.
4. Dalam hal penyelesaian perkara, batas waktu penyelesaian perkara sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutasi. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya melebihi waktu 5 (lima) bulan, Majelis Hakim membuat laporan ke Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.
6. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu, yaitu *one day publish* (satu hari setelah putus).

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dengan pagu awal sebesar Rp. 6.203.470.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 6.346.277.000,-
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , dengan pagu awal sebesar Rp. 136.500.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 123.800.000,-

B.1. Revisi DIPA

Dalam rangka penyesuaian anggaran belanja dengan perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja, perlu dilakukan perubahan rincian anggaran belanja Pengadilan Negeri Nganjuk melalui revisi DIPA.

Selama periode berjalan Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengadakan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Revisi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) tahun 2022 terdiri dari :

1. Revisi DIPA ke 1 tanggal 16 Februari 2023
Revisi perubahan pejabat pengelola keuangan dan penarikan halaman 3 DIPA.
2. Revisi DIPA ke 2 tanggal 17 April 2023

Revisi penarikan halaman 3 DIPA

3. Revisi DIPA ke 3 tanggal 14 Juli 2023

Belanja barang

- Pada akun 522112 belanja langganan telpon dari Rp. 7.000.000 menjadi Rp. 3.000.000.
- Pada akun 522113 belanja langganan air dari Rp. 5.700.000 menjadi 3.700.000.
- Pada akun 523121 belanja pemeliharaan genset dari Rp. 4.190.000 menjadi 3.190.000.
- Pada akun 523121 belanja pemeliharaan AC Split dari Rp. 9.150.000 menjadi 14.650.000.
- Pada akun 523121 belanja pemeliharaan kendaraan roda 4 dari 51.420.000 menjadi 61.420.000.

4. Revisi DIPA ke 4 tanggal 24 September 2023.

- Revisi tambahan belanja modal belanja pengadaan fasilitas perkantoran sebesar Rp. 100.438.000.

5. Revisi DIPA ke 5 tanggal 23 Oktober 2023.

- Revisi terkait rencana penarikan halama 3 DIPA untuk belanja barang dan belanja modal.

6. Revisi DIPA ke 6 tanggal 17 November 2023.

- Pada akun 521119 belanja barang operasional lainnya dari 500.000 menjadi 100.000.
- Pada akun 524111 belanja transport dari Rp. 12.000.000 menjadi Rp. 10.000.000.
- Pada akun 524111 belanja uang harian dari Rp. 38.130.000 menjadi 32.730.000
- Pada akun 524111 belanja penginapan dari Rp. 9.000.000 menjadi 6.100.000
- Pada akun 521119 konsumsi rapat koordiansi dengan instansi terkait dari Rp 2.400.000 menjadi 1.900.000.
- Pada 523121 belanja pemeliharaan peralatan dan mesin untuk genset dari Rp. 2.190.000 menjadi 1.191.000.

7. Revisi DIPA ke 7 tanggal 1 Desember 2023.

Revisi penarikan halama 3 DIPA.

8. Revisi DIPA ke 8 tanggal 28 Desember 2023.

Revisi pagu minus.

Revisi DIPA 03 (Ditjen Baan Peradilan Umum) tahun 2022 terdiri dari :

1. Revisi ke 1 tanggal 20 Februari 2023

Revisi perubahan pejabat pengelola keuangan dan penarikan halaman 3 DIPA.

2. Revisi ke 2 tanggal 14 April 2023
 - Pada akun 521811 belanja bahan persediaan barang konsumsi dari Rp. 19.875.000 menjadi Rp. 29.475.000.
 - Pada akun 521211 belanja bahan berupa konsumsi pengamanan kepolisian senilai dadi Rp. 24.000.000 menjadi Rp. 14.400.000.
3. Revisi ke 3 tanggal 12 Juli 2023
 - Pada akun 521811 belanja bahan persediaan barang konsumsi dari Rp. 29.475.000 menjadi Rp. 41.475.000.
 - Pada akun 524113 belanja perjalanan dinas dalam kota berupa pengiriman penetapan hari sidang dari Rp. 11.200.000 menjadi Rp.6.200.000.
 - Pada akun 521211 belanja bahan untuk konsumsi pengamanan kepolisian dari Rp. 14.400.000 menjadi Rp. 7.400.000
4. Revisi ke 4 tanggal 2 Oktober 2023
 - Pada akun 521811 belanja bahan persediaan barang konsumsi dari Rp. 41.475.000 menjadi 38.465.000.
 - Pada akun 524113 belanja perjalanan dinas dalam kota berupa pengiriman penetapan hari sidang dari Rp. 6.200.000 menjadi 1.000.000.
 - Pada akun 521114 belanja perjalanan dinas dalam kota berupa pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dari Rp. 11.900.000 menjadi 14.900.000
 - Pada akun 521211 belanja bahan untuk konsumsi pengamanan kepolisian dari Rp. 7.400.000 menjadi Rp. 3.600.000
 - Pada Pada akun 521211 belanja bahan penggandaan dan penjilidan berkas perkara dari 11.900.000 menjadi 4.800.000.

B.2 Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2023, Nomor: DIPA-005.01.2.098242/2023 dan Nomor. DIPA-005.03.2.099148/2023 tanggal 30 November 2022 pagu dan realisasi anggaran per program Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB adalah sebagai berikut

Tabel 3.104. Pagu Dan Realisasi DIPA 01 dan Dipa 03 Tahun 2023

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	098242	Pengadilan Negeri Nganjuk	Belanja Peralatan Dan Mesin Esktakomtabel	4.446.000	3.763.214	84,64%

			Belanja Pegawai	4.561.496.000	4.239.483.800	94,09%
			Belanja Barang	1.366.091.000	1.245.006.556	99,45%
			Belanja Modal	414.244.000	332.650.000	99,43%
			Jumlah	6.346.277.000	6.065.964.437	95,58%
2.	099148	Pengadilan Negeri Nganjuk	Belanja Barang	123.800.000	122.576.633	99,01%
			Jumlah	123.800.000	122.576.633	99,01%

Tabel 3.105. Perbandingan Persentase Serapan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2020- 2023

No.	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Serapan
1.	2023			
	DIPA 01	6.346.277.000	6.065.964.437	95,58%
	DIPA 03	123.800.000	122.576.633	99,01%
2.	2022			
	DIPA 01	6.335.156.000	6.266.202.956	98,91%
	DIPA 03	142.806.000	137.235.000	96,10%
3.	2021			
	DIPA 01	5.464.326.000	5.412.253.319	99%
	DIPA 03	141.306.000	118.340.200	96%
4.	2020			
	DIPA 01	5.314.143.000	5.266.015.751	99%
	DIPA 03	143.700.000	128.362.100	89%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja dari tahun 2020 – 2023 pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengalali fluktuasi namun perbandingannya tidak terlalu besar. Pada tahun 2023, capaian kinerja anggaran pada DIPA 01 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 98,91% ke 95,58 % yaitu sebesar 3.33%. Hal ini dikarenakan pada belanja pegawai masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran. Sedangkan untuk DIPA 03 mengalami kenaikan capaian kinerja sebesar 2.91%, dimana pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 96,10 sedangkan pada tahun 2023 capaian kinerja pengelolaan anggaran mencapai 99,01%.

A. 3 Jumlah PNBPNBP.

Pada tahun 2022, penerimaan bukan pajak yang disetor ke kas negara oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB untuk Dipa 01 sebesar Rp. 5.497.704, sedangkan untuk Dipa 03 sebesar Rp. 38.857.000.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB tahun 2023 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dan dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 1 /KPN.W14-U27/SK/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Kesatu :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B
- Ketiga :** Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.
- Keempat :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 8 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B

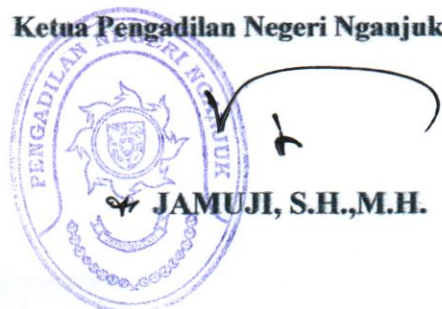

✱ JAMUJI, S.H., M.H.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
NGANJUK KELAS I B
NOMOR : 1 /KPN.W14-U27/SK/I/2024
TANGGAL : 08 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Jamuji, SH,MH. NIP. 19690810 199003 1 001
2.	Koordinator Validasi Data	1. Ivan Endah Dayatra, SH,MH. NIP. 19740726 200003 1 001 2. Ari Efendi,SH. NIP. 19820912 200604 1 002
3.	Ketua	Warsito, SH. NIP. 19760202 200112 1 003
4.	Sekretariat	1. Ratih Dwi Anggraeni, SE. NIP. 19810926 22502 2 002 2. Rosi Denovi Puspitasari, SH. NIP. 19950907 201903 2 011 3. Taufik Arodi, SE. 4. NIP. 19950522 202203 1 009 5. Sri Wahyuni Handayani,A.Md. NIP. 19990306 202321 2 002
5.	Anggota	1. Mujiono, SH.,MH. NIP. 19640115 198903 1 003 2. Agus Prasetyo, SH. NIP. 19720123 200112 1 002 3. Pujiyati, SH.,MH. NIP. 19720723 200604 2 001 4. Kamiran Sudiadi, SH. NIP. 19810924 200812 1 002 5. Ivan Daniel Tentua,SH. NIP. 19841103201101 1 008 6. Lily Faradina, SH. NIP. 19970822 202012 2 003 7. Adi Supriono, SH,MH. NIP. 19870514 200604 1 004 8. Laudia Vallentine A.A.A.Md NIP. 19980624 202012 2 002 9. Ahmad Koirul NIP. 19730512 201212 1 002 10.Melsiada Mustika Karlina,A.Md. NIP. 19951129 200203 2 025
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Dyah Ratna Paramita,SH,MH. NIP. 19810204 200604 2 003 2. Mohammad Hasanuddin Hefni,SH.,MH. NIP.19760611 200704 1 001

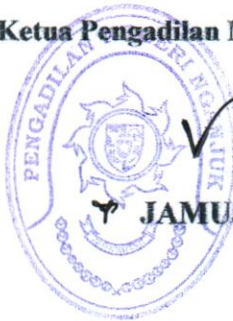
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B


JAMUJI, S.H.,M.H.

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusun Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun lapora kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit .
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas

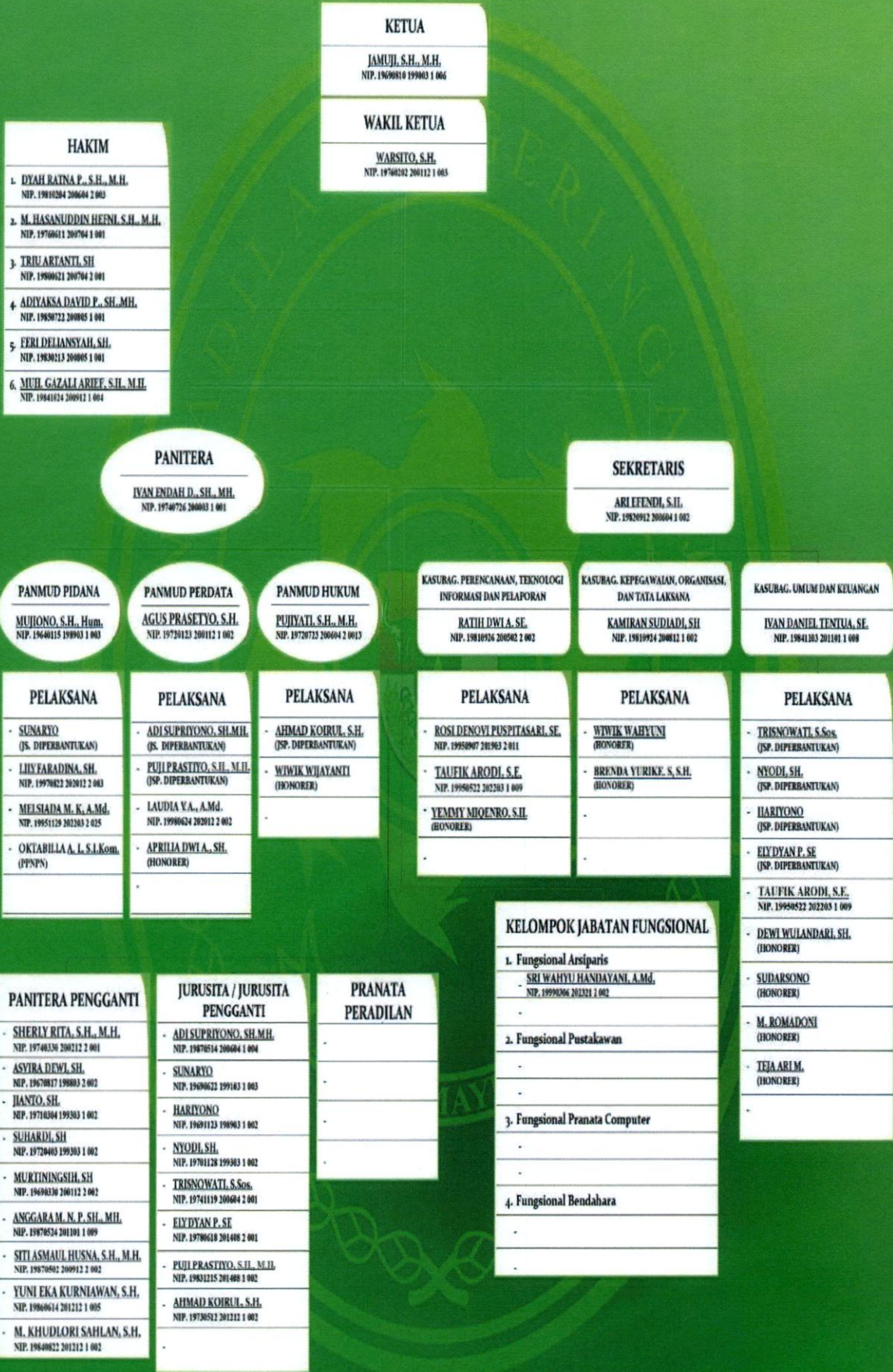
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B


JAMUJI, S.H.M.H.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator: - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan	a. Definisi Operasional Indikator: SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum	Panitera	Laporan Bulanan Dan

		pendekatan keadilan restoratif.	- Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : < 50%		Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	a. Definisi Operasional Indikator: - Jumlah perkarayang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yag diselesaikan adalah perkara yang diputusdan dimunutasi pada tahun berjalan b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah PerkaraYang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	a. Definisi Operasional Indikator: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, anantara lain	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 70%		
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	a. Definisi Operasional Indikator: - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : >70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	a. Definisi Operasional Indikator: - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan: Index Kepuasan Pencari Keadilan c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%		
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang sampaikan ke Para Pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator: • Untuk Penagdilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak. • Sema nomor 1 tahun 2011 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus /dkirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486 /Dju/HM.0.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	a. Definisi Operasional Indikator: • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : < 50%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan.	a. Definisi Operasional Indikator: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : < 50%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	a. Definisi Operasional Indikator: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : < 50%		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	a. Definisi Operasional Indikator: - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan Hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).	a. Definisi Operasional Indikator: - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT: Berkekuatan Hukum tetap. - Putusn yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanaka, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : 50 %		
--	--	--	--	--	--

Nganjuk, 29 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



JAMUJI, S.H.M.H.,
NIP. 19690810 199003 1 006

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Nganjuk
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung.
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi										
	Uraian	Indikator kinerja			Uraian	Indikator kiinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024		Anggaran (Rp)				
															Jum lah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	85%	Terwujudnya peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesai kan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 70%	100% 70%	100% 70%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manaje men peradilan umum	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	356	PKR	119200.000	98.806.000	117.306.000	98.300.000	111.000.000	

		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94%	90%	80%	80%	80%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	5	PKR	1.700.000	9.000.000	925.000	925.000	50.000
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94%	95%	90%	90%	90%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	5	PKR	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	70%		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	15%	70%	70%	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu	90%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	90%	90%	90%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	356	PKR	10.000.000	11.500.000	12.500.000	7.910.000	7.120.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--	--	-----	--	--	---	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Mengetahui,
Ketua

JAMUJI, S.H.,M.H.

Sekretaris

ARI EFENDI, S.H.

Nganjuk , 8 Januari 2024

Panitera,

IVAN ENDAH DAYATRA, S.H.,M.H.

**MATRIK PENDANAAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B
TAHUN 2020-2024**

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Anggaran (rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Layanan umum	-	5.000.000	5.000.000	4.446.000	-
			Layanan Perkantoran (gaji dan tunjangan)	4.107.356.000	4.107.356.000	4.107.356.000	5.927.587.000	4.738.899.000
			Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	1.181.787.000	1.188.889.000	1.370.387.000	1.341.091.000	1.330.208.000
		Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Layanan sarana internal	25.000.000	87.500.000	371.342.000	414.244.000	-
3.	Program Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Percepatan penyelesaian perkara	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	119.200.000	98.806.000	117.306.000	98.300.000	111.000.000
			Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	28.000.000



Nganjuk, 8 Januari 2024
Sekretaris,

ARI EFENDI, S.H.

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023				
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB				
NOMOR: 79 /KPN.W14-U27/RA1.9/2024				
No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		1.	Pidana	100%
		2.	Perdata	70%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	70%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7%
		a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	80%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal “BB”	75
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	97%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	80%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%
		k.	Pelanggaran disiplin	1%

7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1 aplikasi
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c.	Prosentase distribusi surat	100%
		d.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e.	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%
		f.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5
		g.	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	30 berita
		h.	Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan
		i.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	250 orang
		j.	Jumlah layanan bantuan hukum	200 orang
		k.	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l.	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2
		m.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit
		n.	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit
		o.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%

Nganjuk, 8 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



JAMUJI, S.H.,M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : JAMUJI, S.H., M.H.
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**.

N a m a : Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

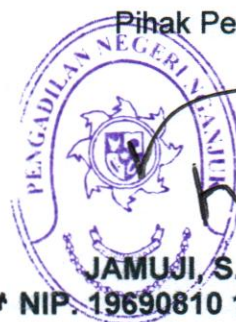
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 11 Januari 2024



Pihak Kedua,

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003



Pihak Pertama,

JAMUJI, S.H., M.H.
* NIP. 19690810 199003 1 006

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		1.	Pidana	100%
		2.	Perdata	70%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	70%
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	80%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal "BB"	75
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Bilai IKM	90%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	97%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	80%
		j.	Prosentase kedisiplinan masuk kerja	95%
		k.	Pelanggaran disiplin	1%
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1 aplikasi
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c.	Prosentase distribusi surat	100%
		d.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e.	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%
		f.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5
		g.	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	30 berita
		h.	Jumlah layanan pengadilan	7 layanan
		i.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	250 orang
		j.	Jumlah layanan bantuan hukum	200 orang
		K.	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l.	Jumlah pemeliharaan gedung	3000 m2
		m.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit
		n.	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit
		o.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Tahun 2023 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen.	Rp. 6.346.277.000,-
	A. Layanan Umum	Rp. 4.446.000,-
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 5927.587.000,-
	C. Layanan sarana dan prasarana internal	Rp. 414.244,000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 123.800.000,-
	A. Percepatan penyelesaian perkara	Rp. 1.500.000,-
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	Rp. 98.300.000,-
	C. Layanan bantuan hukum perseorangan	Rp. 24.000.000,-

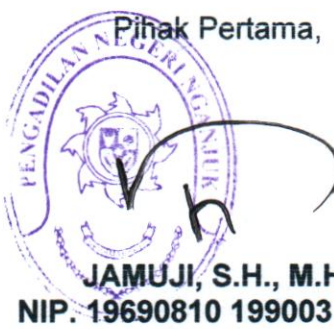
Surabaya, 1/ Januari 2024

Pihak Kedua,



DR. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003

Pihak Pertama,



JAMUJI, S.H., M.H.
NIP. 19690810 199003 1 006

Lampiran I
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
 Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
 Tanggal : 17 Juli 2023

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN I PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	70%	100%	142,85%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%	0%	--NA--
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	-	-
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	-	-
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	70%	0%	0%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	93,35%	103,92%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan Maret 2023, belum terdapat perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.	Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan Maret 2023, tidak terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversi. Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.	Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk

		perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan Maret 2023 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	-	-
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana	90%	100%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	11,75%	168%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Dari 14 perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi, hanya 2 perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

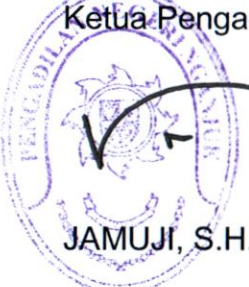
No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan Maret tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak mendapatkan dana untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penangana perkara prodeo pada tahun yang akan datang.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan Maret tahun 2023, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kerjasama dengan advokad untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Terdapat 1 (satu) permohonan eksekusi masuk selama triwulan I dan belum terdapat pelaksanaan eksekusi pada triwulan I	Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmanning	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan anmanning.

Nganjuk, 31 Maret 2023
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,



JAMUJI, S.H.,M.H.

Lampiran I
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
 Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
 Tanggal : 17 Juli 2023

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN II PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	70%	100%	142,85%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%	0%	--NA--
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	99,43%	124,29%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	100	111,11%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	70%	0%	0%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	97%	107,78%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim

		pelimpahan perkara setelah melalui proses pemerikasaan oleh meja 1.		Pengawas Bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan Juni 2023, belum terdapat perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.	Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan Juni 2023, tidak terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversi. Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.	Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.

5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan Juni 2023 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	-	-
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana	90%	100%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	10,26%	146,57%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Sampai dengan tiwulan II, keberhasilan mediasi sangatlah kecil dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan.	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi.	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

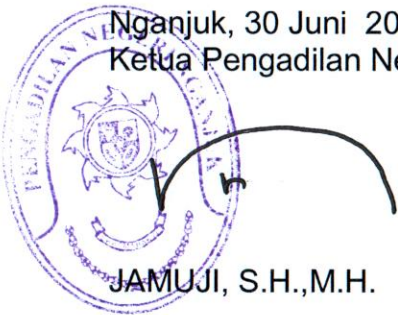
No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan Juni tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak mendapatkan dana untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo pada tahun yang akan datang.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan Juni tahun 2023, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kerjasama dengan advokat untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan menyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	25%	50%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Terdapat 4 (empat) permohonan eksekusi masuk selama triwulan II, 1 (satu) perkara cabut, dan 3(tiga) perkara masih dalam proses.	perkara masih dalam proses teguran eksekusi.	Melaksanakan koordinasi yang baik antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi seperti pihak kepolisian unntk melakukan pengamanan eksekusi, perangkat desa serta pemohon dan termohon eksekusi.

Nganjuk, 30 Juni 2023
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,



JAMUJI, S.H.,M.H.

Lampiran I
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
 Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
 Tanggal : 17 Juli 2023

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN III PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	70%	100%	142,85%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%	0%	--NA--
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	-	-
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	-	-
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	70%	100%	142,85%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95%	105,5%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim

		pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.		Pengawas Bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan September 2023, terdapat 1 (satu) perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.	Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan September 2023, terdapat 1 (satu) perkara anak yang diajukan diversi dan berhasil dilakukan diversi.	1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e-litigasi.

			melaksanakan persidangan secara e-litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan September 2023 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	-	-
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana	90%	100%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	8%	114,28%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Sampai dengan tiwulan III, keberhasilan mediasi sangatlah kecil dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan.	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi.	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk meyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

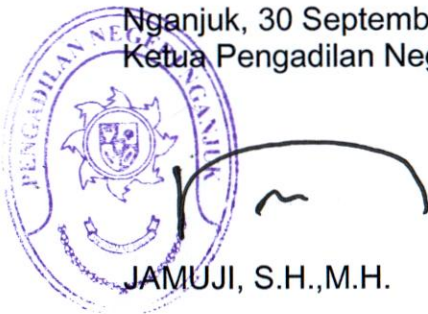
No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan September tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak mendapatkan dana untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo pada tahun yang akan datang.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan September tahun 2023, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kerjasama dengan advokad untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan menyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	42,86%	85,75%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Terdapat 7 (tujuh) permohonan eksekusi masuk selama triwulan III, 4 (empat) perkara ditindaklanjuti, dan 3 (tiga) perkara masih dalam proses.	1 perkara masih dalam proses teguran eksekusi dan terdapat 2 perkara yang ditangguhkan.	Melaksanakan koordinasi yang baik antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi seperti pihak kepolisian unntk melakukan pengamanan eksekusi, perangkat desa serta pemohon dan termohon eksekusi.

Nganjuk, 30 September 2023
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,



JAMUJI, S.H.,M.H.

Lampiran I
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
 Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
 Tanggal : 17 Juli 2023

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN IV
 PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB**

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	70%	100%	142,85%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%	0%	--NA--
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	92,96%	116,12%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	95,52%	106,13%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	70%	100%	142,85%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95,76%	106,4%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim

		pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.		Pengawas Bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan Desember 2023, terdapat 1 (satu) perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.	Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan Desember 2023, terdapat 1 (satu) perkara anak yang diajukan diversi dan berhasil dilakukan diversi.	1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e-litigasi.

			melaksanakan persidangan secara e-litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan Desember 2023 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	-	-
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana	90%	100%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	9%	128,57%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Dari 33 perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi, terdapat 3 perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi.	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi.	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

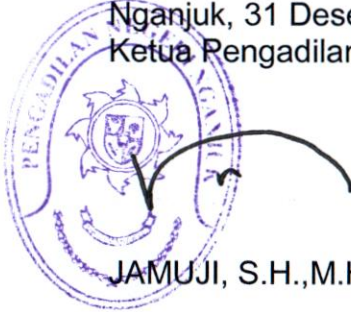
No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan Desember tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak mendapatkan dana untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penangana perkara prodeo pada tahun yang akan datang.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan Desember tahun 2023, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kerjasama dengan advokad untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	40%	80%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Terdapat 10 (sepuluh) permohonan eksekusi masuk sampai dengan triwulan 4, 4 (empat) perkara ditindaklanjuti, dan 6 (enam) perkara masih dalam proses.	4 perkara masih dalam proses teguran eksekusi dan terdapat 2 perkara yang ditangguhkan.	Melaksanakan koordinasi yang baik antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi seperti pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan eksekusi, perangkat desa serta pemohon dan termohon eksekusi.

Nganjuk, 31 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,



JAMUJI, S.H.,M.H.